

LAPORAN TAHUNAN 2023



**BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN PENDAPATAN
DAERAH**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, sehingga Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna dapat menyelesaikan Laporan Tahunan. Laporan Tahunan 2023 merupakan refleksi pelaksanaan kegiatan di Badan Pengelolaan Keuangan, dan Pendapatan Daerah secara periodik dalam rangka melaksanakan visi dan misi Bupati Natuna tahun 2021 - 2026.

Disamping itu, penyajian Laporan Tahunan merupakan wujud dari transparansi pengelolaan keuangan daerah serta sebagai bahan review untuk meningkatkan kinerja dan evaluasi agar pelaksanaan kegiatan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dapat ditingkatkan di masa yang akan datang, sehingga penyelenggaraan pelayanan publik yang mengarah pada layanan profesional dan kompeten. Hasil evaluasi ini dapat dijadikan dasar dalam perbaikan perencanaan kegiatan pada tahun mendatang untuk mencapai visi dan misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

Akhir kata semoga Laporan Tahunan 2023 ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai acuan bagi peningkatan dan perbaikan kinerja pada masa yang akan datang.

Ranai, Maret 2024

Kepala,



SURYANTO, SE, MA

NIP. 197705122000121004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TA.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Sejarah Berdirinya Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.....	1
BAB II GAMBARAN UMUM.....	2
A. Tujuan.....	2
B. Fungsi.....	2
C. Kewenangan.....	4
D. Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	4
E. Sumber Daya Manusia.....	25
F. Sarana dan Prasarana.....	26
BAB III VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM KEGIATAN.....	31
A. Visi dan Misi RPJMD 2021 - 2026.....	31
B. Program Prioritas BPKAD Pendukung Visi Misi RPJMD 2021 - 2026.....	34
C. Program BPKAD Yang Tertuang Dalam RPJMD yang tertuang dalam RPJMD 2021 - 2026 yang disertai Penderesannya.....	43
D. Tujuan Sasaran Program Kegiatan Prioritas.....	46
BAB IV HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN.....	57
A. Pelaksanaan Program / Kegiatan 2 Tahun Terakhir (Target dan Realisasi Tahun 2022 dan 2023).....	57
B. Hasil Capaian Program RPJMD 2021 - 2026 melalui pelaksanaan RKPD Tahun 2022 dan 2023.....	76
C. Hasil Capaian Indikator Kinerja Daerah Tahun 2022 - 2023.....	79

D. Pelaksanaan Kerjasama dengan Pihak Ketiga Antara Pemerintah Baik Pusat, Provinsi, Kabupaten Dengan Kabupaten Lainnya.....	82
E. Keberhasilan/penghargaan Yang diperoleh dari Pemerintah Daerah, Pemamintah Provinsi dan Pemamintah Pusat.....	82
F. Pelaksanaan Inovasi Perangkat Daerah.....	83
G. Rekomendasi dan tindak lanjut untuk Rencana Pembangunan Tahun 2024/2025 berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Pembangunan 2021.....	84

BAB V	HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN RUTINITAS PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN TUPOKSI.....	86
BAB VI	PENUTUP.....	94
	A. Kesimpulan.....	94
	B. Rekomendasi.....	95

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi Pegawai PNS Menurut Jenis Kalemim.....	25
Tabel 2.2	Komposisi Pegawai Non PNS Menurut Jenis Kalemim Tahun 2023	25
Tabel 2.3	Komposisi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menurut jenis kalemim.....	26
Tabel 2.4	Komposisi Pegawai Menurut Pangkat/Golongan Ruang Tahun 2023.....	26
Tabel 2.5	Komposisi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menurut tingkat pendidikan.....	27
Tabel 2.6	Komposisi Pegawai Menurut Diklat Kepemimpinan Tahun 2023.....	28
Tabel 2.7	Jenis dan Spesifikasi Sarana dan Prasarana Tahun 2023	29
Tabel 3.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan dengan Program Pembangunan Daerah.....	35
Tabel 3.2	Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaannya Kabupaten Natuna Tahun 2021 - 2026 Badan Pengelolaan Keuangan, dan Pendapatan Daerah.....	46
Tabel 3.3	Rencana Strategi Tahun 2022 - 2026 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.....	48
Tabel 4.1	Hasil Capaian Program RPJMD 2021 - 2026 melalui Pelaksanaan RKPD Tahun 2022 dan 2023 sesuai urusan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.....	58
Tabel 4.2	Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022.....	69
Tabel 4.3	Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023.....	72

Tabel 4.4	Hasil Capaian Program RPJMD 2021-2026 Pendukung Visi dan Misi Bupati Natuna Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun 2022 dan 2023 urusan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.....	78
Tabel 4.5	Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Pendukung Visi Misi Tahun 2022 - 2023.....	80
Tabel 4.6	Rekomendasi dan Tindakanjuz Permasalahan Urusan Berdasarkan Program/Kegiatan/Sub kegiatan Untuk Perencanaan Tahun berikutnya.....	84
Tabel 5.1	Laporan Realisasi Anggaran Sekretariat Tahun 2023.....	87
Tabel 5.2	Laporan Realisasi Bidang Anggaran Tahun 2023.....	89
Tabel 5.3	Laporan Realisasi Bidang Perbandeharaan Tahun 2023.....	90
Tabel 5.4	Laporan Realisasi Bidang Akuntansi dan Palaporan Keuangan Daerah Tahun 2023.....	91
Tabel 5.5	Laporan Realisasi Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2023.....	92
Tabel 5.6	Laporan Realisasi Pengelolaan Pendapatan Tahun 2023.....	93



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi	3
------------	---------------------	---

BAB I PENDAHULUAN

A. Sejarah Berdirinya Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 1 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah dan Badan Kabupaten Natuna. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang pemerintahan yang menjadi kawanengon daerah dalam melaksanakan fungsinya sebagai penunjang keuangan dan pendapatan daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah berkedudukan sebagai unsur Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah dan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan penunjang Pemerintahan Daerah di bidang tata usaha pelaksanaan keuangan daerah yang menjadi kawanengon daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah. Dalam kagiatannya berpedoman pada visi dan misi kepala daerah sehingga penyusunan program manitikberatkan pada pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah dalam mewujudkan good governance dan clean governance. Rancangan Kerja (Ranja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah terwujud sebagai manifestasi Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah dijabarkan dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026.

BAB II

GAMBARAN UMUM

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang petunjuk teknis penataan organisasi perangkat daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010, maka Pemerintah Kabupaten diberikan kewenangan untuk membentuk Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan potensi daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna merupakan Badan dengan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah, yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Staf Ahli, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Inspektorat dan Badan Kabupaten Natuna. Tugas pokok Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, secara umum dapat dirinci sebagai berikut:

A. Tujuan

Dalam melaksanakan kedudukan, tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dan mempunyai tugas "Merumuskan, mengkoordinasikan, dan menetapkan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah serta melaksanakan tugas lainnya yang diserahkan Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya".

B. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna, mempunyai fungsi:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan bidang Pengelolaan Keuangan dan Asat Daerah sesuai perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun dan tahunan sesuai lingkup tugasnya;
2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, tata usaha, dan aset/barang persediaan;
3. Menetapkan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi tugas pokok selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Mengkoordinasikan program, perhitungan anggaran dan belanja daerah serta Pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah dengan instansi teknis terkait;
5. Mengkoordinasikan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan perubahan dengan instansi terkait;
6. Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan ekuntansi keuangan daerah agar dapat melaksanakan pelayanan penatausahaan keuangan daerah tertib;
7. Mengkoordinasikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian keuangan dan aset daerah dengan instansi terkait;
8. Menetapkan kebutuhan anggaran belanja langsung dan tidak langsung badan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
9. Membina dan mengevaluasi kinerja pegawai di lingkup badan;
10. Mengkoordinasikan, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas kepada atasan;
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya.

C. Kawerangan

Badan merupakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di Bidang Keuangan dalam pengelolaan keuangan dan esat daerah yang menjadi kawerangan Daerah.

D. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Susunan organisasi yang disajikan dalam gambar dibawah ini.



Diagram 2.1 - Decision Diagram

Flowchart showing the decision process for the classification of a patient with a suspected diagnosis of a disease.

Flowchart showing the decision process for the classification of a patient with a suspected diagnosis of a disease.



Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan, dan Pendapatan Daerah, terdiri dari:

1. Kepala Badan;
2. Sekretaris, terdiri dari:
 - i. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - ii. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Perencanaan Anggaran, terdiri dari:
 - i. Subbidang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - ii. Subbidang Perencanaan dan Evaluasi Anggaran Daerah; dan
 - iii. Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari:
 - i. Subbidang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah;
 - ii. Subbidang Inventarisasi, Pemeliharaan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah; dan
 - iii. Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, terdiri dari:
 - i. Subbidang Akuntansi;
 - ii. Subbidang Pelaporan Keuangan Daerah; dan
 - iii. Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Bidang Perbendaharaan Daerah, terdiri dari:
 1. Subbidang Pengelolaan Kas Daerah;
 2. Subbidang Penatausahaan Belanja dan Pembiayaan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
7. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, terdiri dari:
 - i. Subbidang Pendataan dan Pendaftaran;
 - ii. Subbidang Pengelolaan/Pelaporan Pajak dan Retribusi; dan
 - iii. Kelompok Jabatan Fungsional.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

9. Kelompok Jabatan Fungsional

Iktisar Jabatan, Tugas dan Fungsi dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dijelaskan dibawah ini:

1. Kepala Badan

Kepala Badan memiliki iktisar Jabatan memimpin, mengkoordinasikan kebijakan terkait bidang perencanaan anggaran, perbandeharaan, pengelolaan barang milik daerah, akuntansi dan pelaporan keuangan daerah dan pengelolaan pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tercapai tujuan organisasi.

Kepala Badan mempunyai tugas pokok merumuskan, mengkoordinasikan, dan kebijakan daerah di bidang badan pengelolaan keuangan, dan pendapatan daerah serta melaksanakan tugas yang diserahkan Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya.

a. Kepala Badan mempunyai urusan tugas sebagai berikut:

1. merumuskan dan menetapkan kebijakan bidang pengelolaan keuangan, dan pendapatan daerah sesuai perencanaan pembangunan lima tahun dan tahunan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, tata usaha, dan aset/barang persediaan;
3. menetapkan kebijakan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah yang menjadi tugas pokok selaku pejabat pengelola keuangan daerah sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan;
4. mengkoordinasikan sumber-sumber pendapatan asli daerah, pajak dan retribusi daerah;
5. mengkoordinasikan program, perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta pengelolaan keuangan, pengelolaan

berang milik daerah dan pendapatan daerah dengan instansi teknis terkait;

- E. mengkoordinasikan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan perubahannya dengan instansi terkait;
 7. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan akuntansi keuangan daerah agar dapat melaksanakan pelayanan pemerintahan keuangan daerah tertib;
 8. mengkoordinasikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian keuangan, dan pendapatan daerah dengan instansi teknis terkait;
 9. menetapkan kebutuhan anggaran belanja langsung dan tidak langsung badan sesuai dengan peraturan;
 10. membina dan mengevaluasi kinerja pegawai di lingkup badan;
 11. mengkoordinasikan, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas kepada atasan;
 12. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya.
- b. Kepala menjelaskan fungsi sebagai berikut:
1. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan, dan pendapatan daerah;
 2. penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
 3. pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
 4. pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
 5. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai lingkup tugasnya.

2. Sekretaris

Iktisr jabatan memimpin, mengkoordinasikan, dan menyusun bahan kebijakan terkait pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan/evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dan pelaksanaan pembinaan administrasi Subbagian Perencanaan dan Pelaporan, Subbagian Umum dan Kepegawaian dan Subbagian Keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tercapai tujuan organisasi.

Tugas pokok Sekretaris adalah menyusun, merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi kebijakan urusan perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian, tatausaha, kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan, serta mengkoordinasikan tugas Kepala Badan.

a. Sekretaris memiliki urusan tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja lima tahun dan tahunan badan dan di lingkup sekretariat;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahannya sesuai bidang tugasnya;
- c. menyusun pengelolaan dan pelaksanaan administrasi surat menyurat, kearsipan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, inventarisasi, dan rumah tangga;
- d. mengkoordinasikan penyajian data dalam rangka penyusunan perencanaan dan pelaporan Badan;
- e. menyusun pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata usaha;
- f. mengkoordinasikan penyusunan perencanaan, penyusunan pelaporan dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- g. menyusun pelaporan Badan;
- h. mengevaluasi rencana kerja Sekretaris dan kinerja Badan;
- i. mengevaluasi dan membina kinerja pegawai di lingkup Sekretaris;
- j. menyimpulkan dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan

- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- b. Fungsi Sekretariat terdiri dari:
 - a. penyusunan kebijakan teknis di bidang urusan Sekretariat;
 - b. penyelenggaraan urusan perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehormatan dan keprotokolan;
 - c. pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehormatan dan keprotokolan;
 - d. pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehormatan dan keprotokolan; dan
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

3. Bidang Perencanaan Anggaran

Bidang Perencanaan Anggaran memiliki lhtsiser jabatan mengkoordinasikan dan menyusun bahan kebijakan terkait perencanaan anggaran sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar tercapainya tujuan organisasi. Bidang Perencanaan Anggaran mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis bidang anggaran.

Tugas pokok dalam perumusan prosedur penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD sesuai ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi keuangan, Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan anggaran sesuai peraturan keuangan yang berlaku agar tertib

administrasi, mengkoordinasikan pengelolaan anggaran daerah sesuai dengan prosedur yang berlaku agar kegiatan berjalan lancar. Mengkoordinasikan perumusan program dan kebijakan teknis penyusunan anggaran dan belanja sesuai dengan prosedur yang berlaku agar kegiatan berjalan lancar, penyusunan laporan BLUD, IKM, Penyertaan Modal, Dana Bergulir, Inventasi Jangka Pendek, Tunjangan Profesi Guru PNSD, Tambahan Penghasilan Guru PNSD dan Plutang.

a. Urutan Tugas Bidang Perencanaan Anggaran sebagai berikut:

1. merencanakan penyiapan bahan penyusunan nota keuangan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
2. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang perencanaan anggaran sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
3. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang perencanaan anggaran sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. merencanakan penyiapan bahan penyusunan nota keuangan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD);
5. menyusun pedoman penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD);
6. menyusun pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (PRKA-SKPD);
7. mengevaluasi Rencana Kegiatan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) untuk menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

8. mengevaluasi Perubahan Rancangan Kegiatan Anggaran (PRKA) Setuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD);
9. mengevaluasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Setuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD);
10. mengevaluasi Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran-Setuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD);
11. mengevaluasi pengesahan anggaran;
12. menyusun anggaran kas pemerintah daerah untuk arus kas masuk dan arus kas keluar;
13. merencanakan pemantauan perkembangan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
14. merencanakan koordinasi penyusunan dan pengajuan Rancangan Kegiatan Anggaran Setuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD);
15. merencanakan penyelenggaraan koordinasi percepatan pembangunan dan penyerapan anggaran;
16. merencanakan penyelenggaraan koordinasi program-program nasional sesuai bidang yang dilaksanakan secara bersama antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;
17. menyusun pengesahan realisasi pendapatan dan belanja badan layanan umum daerah;
18. menyusun pengesahan realisasi pendapatan dan belanja jaminan kesehatan nasional;
19. menyusun laporan penyerapan modal;
20. menyusun laporan dana bergulir;

21. menyusun investasi jangka pendek;
 22. menyusun tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil daerah;
 23. menyusun tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil daerah;
 24. menyusun piutang hasil temuan;
- b. Fungsi Bidang Perencanaan Anggaran sebagai berikut:
1. koordinasi pengalokasian anggaran dalam penyusunan KUA PPAS dan KUPA/PPAS Perubahan;
 2. koordinasi penyusunan RKA/DPA SKPD dan atau RKAP/DPPA SKPD;
 3. penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD;
 4. penyusunan peraturan kepala daerah tentang perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD;
 5. koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran;
 6. mengoordinasikan perencanaan anggaran pendapatan;
 7. mengoordinasikan perencanaan anggaran belanja daerah;
 8. mengoordinasikan perencanaan anggaran pembiayaan; dan
 9. penyediaan anggaran kas;
 10. pembinaan perencanaan penganggaran daerah.

4. Bidang Perbandeharaan Daerah

Bidang Perbandeharaan Daerah memiliki ikhtisar jabatan memimpin, mengoordinasikan, dan menyusun bahan kebijakan terkait perbandeharaan daerah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai tujuan organisasi.

Bidang Perbandeharaan Daerah mempunyai tugas pokok merencanakan, menyusun dan mengoordinasikan penyelenggaraan evaluasi dan melaporkan kegiatan bidang Perbandeharaan Daerah serta penyusunan

padoman dan petunjuk teknis penyusunan anggaran Perbandeharaan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

a. Bidang Perbandharaan Daerah memiliki uraian tugas meliputi:

1. menyusun program kerja dan kegiatan serta membuat kerangka acuan kerja Subbidang Perbandharaan;
2. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Perbandharaan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
3. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Perbandharaan Daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. menyiapkan bahan-bahan dalam penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah;
5. menyusun standar operasional prosedur serta melakukan pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi penatausahaan keuangan daerah;
6. menyusun rekapitulasi realisasi gaji PNS di lingkungan pemerintah daerah sebagai lampiran pencairan dana alokasi umum setiap bulannya;
7. melaksanakan identifikasi data pegawai negeri sipil beserta tunjangan keluarga, tunjangan jabatan struktural maupun tunjangan jabatan fungsional;
8. mengawasi pelaksanaan administrasi pemungutan/ pemotongan pajak IWP, PPh Pasal 21, Taperum serta pemotongan PPK bandhara umum daerah;
9. melaksanakan memeriksa perhitungan pembayaran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pegawai negeri sipil;

10. melaksanakan memproses pengujian surat perintah membayar dari pengguna anggaran dalam rangka proses penerbitan surat perintah pencairan dana dan melaksanakan kajian dan pengembangan terhadap sistem penggajian;
 11. menguji kebenaran perhitungan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tercantum dalam surat perintah membayar;
 12. memeriksa register, verifikasi dan meneliti dokumen surat perintah membayar;
 13. menyiapkan proses penerbitan surat perintah pencairan dana belanja Setoran Kerja Perangkat Daerah (SKPD); dan
 14. melakukan penandatanganan SP2D.
- b. Bidang Perbendaharaan Daerah dalam melaksanakan tugasnya menjalankan fungsi sebagai berikut:
1. mengoordinasikan pengelolaan kas daerah;
 2. mengoordinasikan pemindahbukuan uang kas daerah;
 3. mengoordinasikan penatausahaan pembiayaan daerah;
 4. mengoordinasikan pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya;
 5. mengoordinasikan penempatan uang daerah dengan membuka rekening kas umum daerah;
 6. mengoordinasikan pemrosesan, penerbitan dan pendistribusian lembar surat perintah pencairan dana;
 7. mengoordinasikan pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen surat perintah pencairan dan surat perintah membayar, pemberian pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan surat pertanggungjawaban gaji dan non gaji, serta penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Pembayaran (SKPP);

8. mengoordinasikan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/ pematangan dan penyatoren perhitungan fisik ketiga;
9. mengoordinasikan pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas;
10. mengoordinasikan rasionisasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pematangan atas surat perintah pencairan dana dengan instansi terkait;
11. mengoordinasikan penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban; dan
12. mengoordinasikan pelaksanaan penerbitan surat penyediaan dana restitusi/pengembalian kelebihan penerimaan.

5. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah memiliki iktisar jabatan memimpin, mengoordinasikan, dan menyusun bahan kebijakan terkait pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan/evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dan pelaksanaan pembinaan administrasi Subbidang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Subbidang Inventarisasi, Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tercapai tujuan organisasi.

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas pokok penyusunan kebijakan teknis dan pedoman pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

a. Uraian tugas Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai berikut:

1. menyusun rencana operasional di lingkungan bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah berdasarkan program kerja organisasi serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
3. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. menyusun dan menyiapkan rancangan pedoman peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan barang milik daerah;
5. mengkoordinasikan dan mengendalikan pemanfaatan barang milik daerah yang ada pada dinas/bedan/unit kerja lainnya secara berkala melalui inventarisasi guna tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah;
6. menghimpun, menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semester dan laporan barang pengguna tahunan dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kepada Kepala Daerah melalui Kepala Badan;
7. menyusun mekanisme penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah sesuai ketentuan dan peraturan;
8. meneliti, menelaah, memberi pertimbangan dan menindaklanjuti atas usulan pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah;
9. menghimpun, menyimpan dan mengamankan seluruh bukti asli kepemilikan barang milik daerah; dan

10. memonitoring dan mengevaluasi hasil kegiatan pertahun anggaran Sub Bidang Asat berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaan.
- b. Fungsi Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai berikut:
 1. mengoordinasikan penyusunan standar harga berdasarkan jenis dan tipe barang;
 2. mengoordinasikan penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah;
 3. mengoordinasikan penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/pemilikan barang milik daerah;
 4. melaksanakan penatausahaan barang milik daerah;
 5. mengoordinasikan pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;
 6. mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian fisik, administrasi dan hukum barang milik daerah;
 7. mengoordinasikan penyiapan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah;
 8. mengoordinasikan hasil penilaian barang milik daerah;
 9. meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
 10. mengoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah;
 11. mengoordinasikan penyusunan dan penghimpunan laporan barang milik daerah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); dan
 12. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan pengelolaan barang milik daerah.
6. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah memiliki beberapa jabatan memimpin, mengoordinasikan, dan menyusun bahan

kebijakan terkait akuntansi dan pelaporan keuangan daerah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai tujuan organisasi.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok penyusunan kebijakan teknis yang berkaitan dengan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- a. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah memiliki uraian tugas:
 - a. merencanakan dan merumuskan program kerja berkaitan dengan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah berdasarkan kebijakan pimpinan sesuai dengan ketentuan dan peraturan;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun koordinasi pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas Daerah;
 - e. menyusun rasionalisasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban;
 - f. merencanakan koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran;
 - g. merencanakan konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan Pemerintah Daerah;
 - h. merencanakan koordinasi dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten

dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penyerahan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten;

- i. merencanakan penyusunan tanggapan/tindak lanjut terhadap LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - j. menyusun koordinasi, sinkronisasi, dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian Daerah;
 - k. penyusunan analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - l. penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi Pemerintah Daerah;
 - m. penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah;
 - n. pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah;
 - o. pembinaan pengelolaan keuangan BLUD Kabupaten;
 - p. merencanakan koordinasi dan penyusunan statistik keuangan Pemerintahan Daerah;
 - q. pembinaan pengelolaan keuangan PKTP; dan
 - r. menyusun pembinaan pengelolaan dana (BOS).
- b. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah menjalankan fungsinya:
- a. pengoordinasian pembukuan anggaran (akuntansi) penerimaan kas daerah;
 - b. pengoordinasian pembukuan anggaran (akuntansi) pengeluaran kas daerah;
 - c. pengoordinasian kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

- d. pengoordinasian kegiatan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi;
- e. pengoordinasian kegiatan penyusunan Laporan Keuangan SKPD;
- f. pelaksanaan konsolidasi seluruh laporan keuangan SKPD dan BLUD;
- g. penyusunan tanggapan terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- h. pelaksanaan rekonsiliasi realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan;
- i. penyusunan analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- j. penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah;
- k. penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
- l. pelaksanaan verifikasi dan pengujian atas bukti memorial; dan
- m. pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai sistem akuntansi pemerintah daerah.

7. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah memiliki iktisar jabatan memimpin, mengkoordinasikan, dan menyusun bahan kebijakan terkait pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan/evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dan pelaksanaan pembinaan administrasi Subbidang Pendapatan dan Pendeftaran dan Subbidang Pengelolaan, Pelaporan Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tercapai tujuan organisasi.

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok penyusunan rencana kerja di Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- a. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah memiliki uraian tugas meliputi:
 1. merencanakan kebijakan umum kepala Perangkat Daerah dan rencana strategis Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja;
 2. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 3. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 4. merencanakan persiapan bahan perumusan kebijakan tentang pendapatan;
 5. menyusun tugas dan mengendalikannya seluruh kegiatan di pendapatan agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
 6. merencanakan dan melaksanakan kegiatan di Subbidang Pendataan dan Penetapan serta Subbidang Pengalihan, Pembukuan dan Pelaporan;
 7. merencanakan usul dan saran kepada kepala Perangkat Daerah selaku atasan langsung melalui pengkajian yang analitis dan sistematis sebagai bahan pertimbangan pembastan kebijakan dan penyelesaian suatu permasalahan;
 8. mengevaluasi kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja; dan
 9. menyusun laporan pelaksanaan tugas kegiatan bidang pendapatan kepada kepala satuan kerja Perangkat Daerah baik secara lisan maupun tertulis;

b. Fungsi Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan tentang intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
2. melaksanakan pemeriksaan pajak daerah dan retribusi daerah;
3. melaksanakan monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
4. perumusan kebijakan tentang intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
5. melaksanakan pelayanan pendaftaran dan pemungutan pajak daerah;
6. pelaksanaan pendaftaran, penetapan, pendapatan dan penilaian pajak daerah;
7. melakukan analisis regulasi pendapatan daerah;
8. merumuskan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah;
9. melaksanakan monitoring dan sinkronisasi regulasi yang terkait dengan pendapatan asli daerah;
10. perumusan kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
11. perumusan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat;
12. merumuskan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi;
13. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam perumusan kebijakan pendapatan asli daerah;
14. melaksanakan fungsi konsultasi dan pendampingan wajib pajak;
15. menyelenggarakan sistem informasi pajak daerah baik internal maupun eksternal;
16. melaksanakan pemeliharaan basis data pajak;
17. pelaksanaan koordinasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;

18. penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah;
19. pelaporan pendapatan daerah; dan
20. sosialisasi dan konsultasi kebijakan pajak dan retribusi daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna merupakan Badan dengan Type A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Staf Ahli, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Inspektorat dan Badan Kabupaten Natuna. Tugas pokok Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah *"Merumuskan, mengkoordinasikan, dan menetapkan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah serta melaksanakan tugas lainnya yang diserahkan Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya"*. Selanjutnya ditegaskan lagi dalam Pasal 4 ayat (4) bahwa Pejabat Perangkat Daerah terdiri dari:

- a. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Kepala SKPKD selaku PPKD; dan
- c. Kepala SKPD selaku PA.

Selaku SKPKD sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 sebagai berikut:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

3. Melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Peraturan;
4. Melaksanakan fungsi BUD; dan
5. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Sumber Daya Manusia

1. Kepegawaian

a. Komposisi Pegawai ASN dan Non ASN

Secara keseluruhan jumlah personil di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebanyak 141 (seratus empat puluh Satu) orang dengan komposisi pegawai menurut jenis kelamin, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai PNS menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	88
2	Perempuan	53
	Jumlah	141

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Non PNS menurut Jenis Kelamin
Tahun 2022

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	39
2	Perempuan	25
	Jumlah	64

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
menurut Jenis Kalamah

No	Jenis Kalamah	Jumlah
1	Laki-laki	0
2	Perempuan	2
	Jumlah	2

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

b. Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan

Komposisi Pegawai menurut pangkat dan golongan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Komposisi pegawai Menurut Pangkat/Golongan Ruang
Tahun 2022

No	Pangkat / Golongan Ruang	Jumlah
1	Pembina Utama Muda Tk I (IV/c)	-
	Pembina Tk. I (IV/b)	2
	Pembina (IV/a)	3
	Jumlah	5
2	Panata Tk. I (III/d)	10
	Panata (III/c)	17
	Panata Muda Tk. I (II/b)	11
	Panata Muda (II/a)	16
	Jumlah	52
3	Pengatur Tk. I (II/d)	10
	Pengatur (II/c)	7
	Pengatur Muda Tk. I (I/b)	-
	Pengatur Muda (I/a)	-
	Jumlah	17
4	Juru Tk. I (I/d)	-
	Juru (I/c)	-
	Juru Muda (I/b)	-
	Juru Tk. I (I/a)	-

Jumlah		-
5	Pegawai Honorar Daerah	64
Jumlah		64
Jumlah Keseluruhan		139

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

c. Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Klasifikasi pendidikan PNS disajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.4
Komposisi pegawai menurut tingkat Pendidikan PNS
Tahun 2023

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Pasca Sarjana (S2)	2
2	Sarjana (S1)	41
3	Diploma	10
4	SLTA	18
Jumlah		71

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tabel 2.5
Komposisi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
menurut tingkat pendidikan
Tahun 2023

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Sarjana (S1)	2
Jumlah		2

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sedangkan tingkat pendidikan pegawai Non PNS adalah sebagai berikut.

Tabel 2.5
Komposisi pegawai Non PNS Daerah
menurut tingkat pendidikan
Tahun 2023

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Magister (S2)	1
2	Sarjana (S1)	36
3	Diploma	7
4	SLTA	17
5	SLTP	1
6	SD	1
Jumlah		64

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

d. Pegawai Mengikuti Diklat Struktural Kepemimpinan

Pegawai yang mengikuti Diklat Struktural Kepemimpinan di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan, dan Pendapatan Daerah sebagaimana ditampilkan dalam tabel dibawah ini

Tabel 2.6
Komposisi pegawai menurut diklat kepemimpinan
Tahun 2023

No	Jenis Diklat	Jumlah
1	PKM II	1
2	PKM III	3
3	PKM IV	9
Jumlah		13

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2023

P. Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Pengelolaan Keuangan, dan Pendapatan Daerah didukung oleh sarana dan prasarana dibawah ini

Tabel 2.7
Jenis dan Spesifikasi Sarana dan Prasarana 2023

No	Nama Barang / Jenis Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi
1	Kajang Injeksi	1	Unit	Baik
2	TOYOTA HILUX	1	Unit	Baik
3	Sepeda Motor	14	Unit	Baik
4	Global Positioning System	6	Unit	Baik
5	Mesin Hitung Listrik	1	Unit	Baik
6	Mesin Fotocopy Folio	1	Unit	Baik
7	Lemari Besi/Metal	5	Unit	Baik
8	Lemari Kayu	9	Unit	Baik
9	Ring Cabinet Besi	12	Unit	Baik
10	Biankai	3	Unit	Baik
11	CCTV - Camera Control Television System	2	Paket	Baik
12	White Board	1	Unit	Baik
13	Klar Penghantar Kertas	11	Unit	Baik
14	Display	1	Unit	Baik
15	Pintu Listrik (yang Memakai Akses)	7	Unit	Baik
16	Focusing Screen/Layar LCD Projector	4	Unit	Baik
17	Papan Nama Instansi	10	Unit	Baik
18	Papan Tanda Kepemilikan Tanah	33	Unit	Baik
19	Instalasi Telephone	1	Unit	Baik
20	Meja Rapat	2	Unit	Baik
21	Meja Panjang	3	Unit	Baik
22	Bangku Tunggu	6	Unit	Baik
23	Rak Buku (Lemari Rakitan)	5	Unit	Baik
24	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	Unit	Baik
25	Lemari Es	4	Unit	Baik
26	A.C. Split	34	Unit	Baik
27	Televisi	8	Unit	Baik
28	Unit Power Supply	40	Unit	Baik
29	Camera Video	1	Unit	Baik
30	Karpet	1	Unit	Baik
31	Tangki Air	2	Unit	Baik
32	Mesin Potong Rumput	1	Unit	Baik
33	Gorden Tirai	34	Unit	Baik
34	Meja Kerja	80	Unit	Baik
35	Kursi Kerja	88	Unit	Baik
36	Kursi Tamu di Ruang Pajabat Balon II (Kursi Tamu di Ruang Balon I/Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota)	2	Unit	Baik

No	Nama Barang / Jenis Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi
37	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis (Lemari Buku Untuk Pasabot Beton II)	33	Unit	Baik
38	Rak Peralatan	4	Unit	Baik
39	Layar Film, Projector	1	Unit	Baik
40	Camera Digital	6	Unit	Baik
41	LCD Monitor	2	Unit	Baik
42	Telephone (PABX)	1	Unit	Baik
43	Masih Rer (Loudspeaker)	1	Unit	Baik
44	Sound system	1	Unit	Baik
45	Mainframe (Komputer Jaringan)	3	Unit	Baik
46	Local Area Network (LAN)	4	Unit	Baik
47	P.C Unit	65	Unit	Baik
48	Lap Top (Laptop)	12	Unit	Baik
49	Note Book	48	Unit	Baik
50	Hard Disk	27	Unit	Baik
51	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	12	Unit	Baik
52	Printer (Peralatan Mini Komputer)	68	Unit	Baik
53	Peralatan Mini Komputer Lainnya	6	Unit	Baik
54	Mouse (Peralatan Mini Komputer)	3	Unit	Baik
55	Monitor	1	Unit	Baik
56	Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	2	Unit	Baik
57	External/ Portable Hardisk	3	Unit	Baik
58	UPS	12	Unit	Baik
59	Server	3	Unit	Baik
60	Router	11	Unit	Baik
61	Hub	4	Unit	Baik
62	Rak Server	1	Unit	Baik
63	Peralatan Jaringan Lainnya	1	Unit	Baik
Jumlah		763		

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

BAB III

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Visi dan Misi RPJMD 2021 - 2026

Visi dan misi adalah suatu konsep perencanaan yang disertai dengan tindakan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam waktu tertentu. Visi dan misi ini secara proses lahir dari organisasi tersebut didirikan dan menjadi pedoman dalam menjalankan organisasi. Hal tersebut harus dituangkan dalam bentuk tulisan agar semua pihak baik internal maupun eksternal, mengetahui tujuan dari organisasi yang didirikan.

Secara umum, pengertian visi adalah pandangan jauh ke depan dari individu atau suatu organisasi berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai, dan apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut di masa depan. Visi juga merupakan cita-cita atau tujuan suatu organisasi di masa depan yang dibuat secara tertulis, di dalam visi biasanya terdapat pandangan tentang arah suatu manajemen karena arah perusahaan tersebut dibawa.

Sedangkan pengertian misi secara umum adalah segala sesuatu (strategi, tindakan) yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi. Misi organisasi merupakan tujuan dan alasan berdirinya sebuah organisasi dan menjadi pedoman dan arahan dalam mencapai tujuan organisasi. Pengertian misi dapat juga didefinisikan sebagai penjabaran suatu visi dimana dibuat dengan lebih lengkap sehingga dapat dipahami setiap orang yang membacanya.

Dari pengertian diatas, Pemerintah Kabupaten Natuna periode 2021 - 2026 memiliki visi yaitu "Terwujudnya Kabupaten Natuna sebagai Kabupaten Maritim yang Unggul, Ekokota, Aman, dengan Kemandirian Ekonomi Berlandaskan Nilai Religius dan Kultural", pernyataan tersebut memiliki makna, pertama cerdas berarti masyarakat yang mampu berpikir kreatif dan inovatif bagi pengembangan dirinya, maupun pengembangan daerah. Sedangkan Mandiri

memiliki makna masyarakat yang mampu memberdayakan dan memenuhi kebutuhan dalam rangka melanjutkan kehidupannya yang lebih baik. Penjabaran Visi Kabupaten Natuna Periode 2021 - 2026 tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Maritim yang Unggul** Maritim yang unggul memiliki makna bahwa Kabupaten Natuna harus diwujudkan sebagai poros aktivitas maritim di Indonesia. Maritim sendiri adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas kelautan. Sedangkan unggul dapat dimaknai sebagai keinginan untuk menjadikan Kabupaten Natuna memiliki keunggulan dari potensi maritim dan Sumber Daya Manusia yang memiliki kualitas terbaik.
2. **Eksotis** Eksotis dapat dipahami sebagai unsur yang dekat dengan keindahan yang memanjakan mata. Potensi Maritim di Kabupaten Natuna bukan hanya memiliki sumber daya yang melimpah di dalam lautnya, namun juga keindahan dan keindahan yang menyertainya. Potensi tersebut dapat dikembangkan menjadi sebuah nilai jual Kabupaten Natuna sebagai garis pulau terluar di wilayah Indonesia dengan keindahan alamnya sebagai potensi pariwisata.
3. **Aman** Aman dapat diartikan sebagai bebas dari ancaman yang mengganggu aktivitas perekonomian di wilayah Kabupaten Natuna. Wilayah perbatasan merupakan wilayah yang rawan dan Pemerintah Kabupaten Natuna harus menjamin keamanan bagi seluruh kapal yang berlayar di perairan wilayah Indonesia.
4. **Kemandirian Ekonomi** Kemandirian Ekonomi dapat diartikan sebagai harapan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat di Kabupaten Natuna. Sebagai wilayah dengan potensi kelautan yang kaya, Kabupaten Natuna harus mandiri secara ekonomi dan tidak bergantung kepada pihak lain.
5. **Religius** Religius adalah peningkatan kondisi masyarakat Kabupaten Natuna yang menjunjung tinggi kaedah agama beserta nilai dan juga spirit religius yang menjadi pedoman dalam kehidupan, termasuk dalam pengelolaan

pemerintahan dan pelayanan publik yang menjunjung tinggi toleransi serta keteguhan kehidupan antar umat beragama

6. **Kultural.** Kultural adalah Kondisi masyarakat Kabupaten Natuna yang memiliki semangat budaya melayu yang tinggi dan dijadikan jati diri bagi masyarakat Kabupaten Natuna yang harus terus tumbuh seiring dengan peningkatan pembangunan, serta menjadi dasar dalam merajut semangat nasionalisme dan kebhinekaan

Selain dengan visi tersebut, selanjutnya dituangkan dalam misi dan merupakan perwujudan dan bentuk komitmen dalam mencapai visi yang dimaksud. Keberhasilan Pemerintah Daerah harus didukung oleh unit kerja dibawahnya dan harus responsif serta inovatif dalam menginterpretasikan visi dan misi kepala daerah. Misi merupakan upaya umum bagaimana mewujudkan sebuah visi dengan cara-cara yang efektif dan efisien. Misi juga menjadi elemen utama mengapa suatu organisasi harus memiliki komitmen dan konsistensi kinerja yang terus dijaga oleh segenap stakeholders pembangunan. Dalam rangka mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Natuna, ada 7 (tujuh) misi pembangunan yang harus ditampuh yaitu sebagai berikut:

1. Akselerasi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal;
3. Menciptakan kawasan perbatasan yang aman, strategis, dan eksotis;
4. Akselerasi pembangunan infrastruktur yang tertib dan teratur;
5. Menciptakan kualitas, daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup yang berkelanjutan;
6. Menciptakan reformasi birokrasi yang cerdas (smart bureaucracy);
7. Mengoptimalkan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Dari misi tersebut keterkaitan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna berada pada misi ke-6 yaitu

"menciptakan reformasi birokrasi yang cerdas (*smart bureaucracy*)" dengan tujuan "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*good governance*)" dan sasaran yang ingin dicapai yaitu "Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel".

B. Program Pemerintah Daerah Pendukung Visi Misi RPJMD 2021 - 2026

Dalam mencapai target kinerja visi dan misi pada sasaran pembangunan jangka menengah daerah maka strategi dijabarkan secara sistematis untuk mendapatkan gambaran tentang program prioritas, guna mendapatkan "sekumpulan" program prioritas yang tidak terpisahkan di setiap strategi dan arah kebijakan. Dengan itu, dibutuhkan arah kebijakan yang memberikan optimalisasi dalam mencapai tujuan pembangunan daerah melalui program daerah. Program-program pada masing-masing arah kebijakan disebut program pembangunan daerah untuk menggambarkan capaiannya secara langsung terhadap sasaran pembangunan daerah Kabupaten Natuna.

Program pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Suatu program prioritas bersifat strategis mengikuti arsitektur kinerja. Dalam mengidentifikasi program-program prioritas yang bersifat strategis dilakukan dengan cara menganalisis strategi dan arah kebijakan yang telah dirumuskan dan ditentukan, kemudian dijabarkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah yang sifatnya paling krusial. Sehingga akan terjalin keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan dengan program yang ditetapkan. Dengan demikian maka akan terlihat alur keterkaitan antara program dengan strategi dan arah kebijakan menunjukkan pentingnya kejelasan hubungan antara program prioritas dengan sasarannya. Program pembangunan daerah Kabupaten Natuna pada perencanaan pembangunan daerah periode 2021 - 2026 sebagai berikut:

[illegible]

[illegible]

Area	Group	Unit Number	Topic	Learning Objectives	Assessment Method	Assessment
Management Accounting Unit	1. Principles of Management Accounting	1	Concepts of Management Accounting system	1. Explain the purpose and scope of Management Accounting	Assignment: Prepare a report on Management Accounting	Final Exam: Essay question
			2. Explain the importance of Management Accounting	2. Explain the importance of Management Accounting	Assignment: Prepare a report on Management Accounting	Final Exam: Essay question
		2	Concepts of Management Accounting system	3. Explain the importance of Management Accounting	Assignment: Prepare a report on Management Accounting	Final Exam: Essay question
			4. Explain the importance of Management Accounting	4. Explain the importance of Management Accounting	Assignment: Prepare a report on Management Accounting	Final Exam: Essay question
			5. Explain the importance of Management Accounting	5. Explain the importance of Management Accounting	Assignment: Prepare a report on Management Accounting	Final Exam: Essay question
			6. Explain the importance of Management Accounting	6. Explain the importance of Management Accounting	Assignment: Prepare a report on Management Accounting	Final Exam: Essay question
Management Accounting Unit	2. Principles of Management Accounting	3	Concepts of Management Accounting system	7. Explain the importance of Management Accounting	Assignment: Prepare a report on Management Accounting	Final Exam: Essay question
			8. Explain the importance of Management Accounting	8. Explain the importance of Management Accounting	Assignment: Prepare a report on Management Accounting	Final Exam: Essay question
		4	Concepts of Management Accounting system	9. Explain the importance of Management Accounting	Assignment: Prepare a report on Management Accounting	Final Exam: Essay question
			10. Explain the importance of Management Accounting	10. Explain the importance of Management Accounting	Assignment: Prepare a report on Management Accounting	Final Exam: Essay question

Bezeichnung	Ort	Umsatz	Umsatz	Umsatz	Umsatz
Umsatz	Umsatz	Umsatz	Umsatz	Umsatz	Umsatz
			Umsatz	Umsatz	Umsatz
			Umsatz	Umsatz	Umsatz
			Umsatz	Umsatz	Umsatz
			Umsatz	Umsatz	Umsatz
			Umsatz	Umsatz	Umsatz
Umsatz	Umsatz	Umsatz	Umsatz	Umsatz	Umsatz
			Umsatz	Umsatz	Umsatz
Umsatz	Umsatz	Umsatz	Umsatz	Umsatz	Umsatz
			Umsatz	Umsatz	Umsatz
Umsatz	Umsatz	Umsatz	Umsatz	Umsatz	Umsatz
			Umsatz	Umsatz	Umsatz

Area	Group	Unit Number	Topic	Learning Objectives	Assessment Method	Assessment
				1. Explain the importance of the unit in the course	Written, oral, and practical assessment	
				2. Explain the importance of the unit in the course	Written, oral, and practical assessment	
		10	Thermodynamics and the First Law	1. Explain the importance of the unit in the course	Written, oral, and practical assessment	Classroom Assessment
				2. Explain the importance of the unit in the course	Written, oral, and practical assessment	
Thermodynamics and the First Law	10	10	Thermodynamics and the First Law	1. Explain the importance of the unit in the course	Written, oral, and practical assessment	Classroom Assessment
				2. Explain the importance of the unit in the course	Written, oral, and practical assessment	
		10	Thermodynamics and the First Law	1. Explain the importance of the unit in the course	Written, oral, and practical assessment	Classroom Assessment
				2. Explain the importance of the unit in the course	Written, oral, and practical assessment	
Thermodynamics and the First Law	10	10	Thermodynamics and the First Law	1. Explain the importance of the unit in the course	Written, oral, and practical assessment	Classroom Assessment
				2. Explain the importance of the unit in the course	Written, oral, and practical assessment	
		10	Thermodynamics and the First Law	1. Explain the importance of the unit in the course	Written, oral, and practical assessment	Classroom Assessment
				2. Explain the importance of the unit in the course	Written, oral, and practical assessment	
Thermodynamics and the First Law	10	10	Thermodynamics and the First Law	1. Explain the importance of the unit in the course	Written, oral, and practical assessment	Classroom Assessment
				2. Explain the importance of the unit in the course	Written, oral, and practical assessment	
		10	Thermodynamics and the First Law	1. Explain the importance of the unit in the course	Written, oral, and practical assessment	Classroom Assessment
				2. Explain the importance of the unit in the course	Written, oral, and practical assessment	

Baum	Ort	Umfang	Art	Art	Art	Art
Eiche	Eiche	1	1	1	1	1
		2	2	2	2	2
		3	3	3	3	3
		4	4	4	4	4
Buche	Buche	1	1	1	1	1
		2	2	2	2	2
		3	3	3	3	3
		4	4	4	4	4
Kiefer	Kiefer	1	1	1	1	1
		2	2	2	2	2
		3	3	3	3	3
		4	4	4	4	4
Fichte	Fichte	1	1	1	1	1
		2	2	2	2	2
		3	3	3	3	3
		4	4	4	4	4
Tanne	Tanne	1	1	1	1	1
		2	2	2	2	2
		3	3	3	3	3
		4	4	4	4	4
Lärche	Lärche	1	1	1	1	1
		2	2	2	2	2
		3	3	3	3	3
		4	4	4	4	4
Douglasie	Douglasie	1	1	1	1	1
		2	2	2	2	2
		3	3	3	3	3
		4	4	4	4	4
Kiefer	Kiefer	1	1	1	1	1
		2	2	2	2	2
		3	3	3	3	3
		4	4	4	4	4
Fichte	Fichte	1	1	1	1	1
		2	2	2	2	2
		3	3	3	3	3
		4	4	4	4	4
Tanne	Tanne	1	1	1	1	1
		2	2	2	2	2
		3	3	3	3	3
		4	4	4	4	4
Lärche	Lärche	1	1	1	1	1
		2	2	2	2	2
		3	3	3	3	3
		4	4	4	4	4
Douglasie	Douglasie	1	1	1	1	1
		2	2	2	2	2
		3	3	3	3	3
		4	4	4	4	4

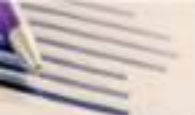
Issue	Impact	Cost Impact	Impact Frequency/Season	Control Measure	Residual Issue
				Preventive maintenance program Inspection Training Weather forecasting Weather alert system	
Weather-related incidents	Disruption of service Safety risk to staff and customers Potential damage to property	Increased repair costs Increased lost revenue Increased insurance costs	1-2 times per season 1-2 times per season	Weather forecasting Weather alert system Weather-resistant equipment Weather-resistant materials	Minor weather-related incidents Potential damage to property

C. Program BPKPD Yang Tertuang Dalam RPJMD 2021-2026 yang disertai pendanaannya

Dalam mendukung RPJMD, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah melaksanakan beberapa program dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Selanjutnya akan disajikan indikasi rencana program prioritas sebagaimana terlampir dalam tabel di bawah ini:



D. Tujuan Sasaran Program Kegiatan Prioritas

Tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan, dan Pendapatan Daerah Kabupaten Niatuna berdasarkan rumusan misi beserta indikator kinerja sasaran sebagai tolok ukur kinerja dan program dan kegiatan prioritas tertuang di dalam Ranstra. Tujuan merupakan penjabaran dan operasionalisasi atas pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan ini disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi.

Sasaran merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran merupakan ukuran pencapaian dari tujuan. Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan, dan Pendapatan Daerah merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis dan ditetapkan untuk dapat menjamin suksesnya pelaksanaan jangka menengah yang bersifat menyeluruh, serta untuk memudahkan pengendalian dan pemantauan kinerja organisasi. Berikut disajikan Matrik Ranstra Perangkat Daerah pada tabel dibawah ini:

Table 11
 2002-2003
 2002-2003
 2002-2003
 2002-2003

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Date	Topic/Session Name/Topic/Session	Notes/Comments	Status	Unit 1		Unit 2		Unit 3		Unit 4		Unit 5		Unit 6		Unit 7		Total
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1/1/2020	Unit 1: Introduction to the course	Unit 1: Introduction to the course	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1/1/2020	Unit 2: The history of the course	Unit 2: The history of the course	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1/1/2020	Unit 3: The importance of the course	Unit 3: The importance of the course	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
1/1/2020	Unit 4: The role of the course	Unit 4: The role of the course	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1/1/2020	Unit 5: The impact of the course	Unit 5: The impact of the course	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
1/1/2020	Unit 6: The future of the course	Unit 6: The future of the course	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
1/1/2020	Unit 7: The conclusion of the course	Unit 7: The conclusion of the course	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
1/1/2020	Unit 8: The final assessment	Unit 8: The final assessment	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
1/1/2020	Unit 9: The end of the course	Unit 9: The end of the course	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
1/1/2020	Unit 10: The final review	Unit 10: The final review	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
1/1/2020	Unit 11: The final exam	Unit 11: The final exam	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
1/1/2020	Unit 12: The final results	Unit 12: The final results	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
1/1/2020	Unit 13: The final feedback	Unit 13: The final feedback	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
1/1/2020	Unit 14: The final report	Unit 14: The final report	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
1/1/2020	Unit 15: The final presentation	Unit 15: The final presentation	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
1/1/2020	Unit 16: The final conclusion	Unit 16: The final conclusion	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
1/1/2020	Unit 17: The final summary	Unit 17: The final summary	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
1/1/2020	Unit 18: The final evaluation	Unit 18: The final evaluation	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
1/1/2020	Unit 19: The final assessment	Unit 19: The final assessment	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
1/1/2020	Unit 20: The final results	Unit 20: The final results	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
1/1/2020	Unit 21: The final feedback	Unit 21: The final feedback	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
1/1/2020	Unit 22: The final report	Unit 22: The final report	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
1/1/2020	Unit 23: The final presentation	Unit 23: The final presentation	23	23	23	2												

[illegible]

[illegible]

Date	Topic/Subject / Assignment	Notes/Details	Status	Category 1		Category 2		Category 3		Category 4		Category 5		Category 6		Total/Summary
				Sub-Category 1.1	Sub-Category 1.2	Sub-Category 2.1	Sub-Category 2.2	Sub-Category 3.1	Sub-Category 3.2	Sub-Category 4.1	Sub-Category 4.2	Sub-Category 5.1	Sub-Category 5.2			
2023-10-01	Mathematics: Algebra	Completed assignment on linear equations.	Done	Algebra	Linear Equations	Algebra	Linear Equations	Algebra	Linear Equations	Algebra	Linear Equations	Algebra	Linear Equations	Algebra	Linear Equations	100%
2023-10-02	Mathematics: Geometry	Completed assignment on area of triangles.	Done	Geometry	Area of Triangles	Geometry	Area of Triangles	Geometry	Area of Triangles	Geometry	Area of Triangles	Geometry	Area of Triangles	Geometry	Area of Triangles	100%
2023-10-03	Mathematics: Calculus	Completed assignment on derivatives.	Done	Calculus	Derivatives	Calculus	Derivatives	Calculus	Derivatives	Calculus	Derivatives	Calculus	Derivatives	Calculus	Derivatives	100%
2023-10-04	Mathematics: Statistics	Completed assignment on probability distributions.	Done	Statistics	Probability Distributions	Statistics	Probability Distributions	Statistics	Probability Distributions	Statistics	Probability Distributions	Statistics	Probability Distributions	Statistics	Probability Distributions	100%
2023-10-05	Mathematics: Trigonometry	Completed assignment on trigonometric functions.	Done	Trigonometry	Trigonometric Functions	Trigonometry	Trigonometric Functions	Trigonometry	Trigonometric Functions	Trigonometry	Trigonometric Functions	Trigonometry	Trigonometric Functions	Trigonometry	Trigonometric Functions	100%
2023-10-06	Mathematics: Number Theory	Completed assignment on prime numbers.	Done	Number Theory	Prime Numbers	Number Theory	Prime Numbers	Number Theory	Prime Numbers	Number Theory	Prime Numbers	Number Theory	Prime Numbers	Number Theory	Prime Numbers	100%
2023-10-07	Mathematics: Set Theory	Completed assignment on set operations.	Done	Set Theory	Set Operations	Set Theory	Set Operations	Set Theory	Set Operations	Set Theory	Set Operations	Set Theory	Set Operations	Set Theory	Set Operations	100%
2023-10-08	Mathematics: Logic	Completed assignment on propositional logic.	Done	Logic	Propositional Logic	Logic	Propositional Logic	Logic	Propositional Logic	Logic	Propositional Logic	Logic	Propositional Logic	Logic	Propositional Logic	100%
2023-10-09	Mathematics: Combinatorics	Completed assignment on counting problems.	Done	Combinatorics	Counting Problems	Combinatorics	Counting Problems	Combinatorics	Counting Problems	Combinatorics	Counting Problems	Combinatorics	Counting Problems	Combinatorics	Counting Problems	100%
2023-10-10	Mathematics: Graph Theory	Completed assignment on graph coloring.	Done	Graph Theory	Graph Coloring	Graph Theory	Graph Coloring	Graph Theory	Graph Coloring	Graph Theory	Graph Coloring	Graph Theory	Graph Coloring	Graph Theory	Graph Coloring	100%
2023-10-11	Mathematics: Discrete Math	Completed assignment on induction proofs.	Done	Discrete Math	Induction Proofs	Discrete Math	Induction Proofs	Discrete Math	Induction Proofs	Discrete Math	Induction Proofs	Discrete Math	Induction Proofs	Discrete Math	Induction Proofs	100%
2023-10-12	Mathematics: Real Analysis	Completed assignment on limits and continuity.	Done	Real Analysis	Limits and Continuity	Real Analysis	Limits and Continuity	Real Analysis	Limits and Continuity	Real Analysis	Limits and Continuity	Real Analysis	Limits and Continuity	Real Analysis	Limits and Continuity	100%
2023-10-13	Mathematics: Complex Analysis	Completed assignment on complex functions.	Done	Complex Analysis	Complex Functions	Complex Analysis	Complex Functions	Complex Analysis	Complex Functions	Complex Analysis	Complex Functions	Complex Analysis	Complex Functions	Complex Analysis	Complex Functions	100%
2023-10-14	Mathematics: Functional Analysis	Completed assignment on Banach spaces.	Done	Functional Analysis	Banach Spaces	Functional Analysis	Banach Spaces	Functional Analysis	Banach Spaces	Functional Analysis	Banach Spaces	Functional Analysis	Banach Spaces	Functional Analysis	Banach Spaces	100%
2023-10-15	Mathematics: Differential Equations	Completed assignment on ordinary differential equations.	Done	Differential Equations	Ordinary Differential Equations	Differential Equations	Ordinary Differential Equations	Differential Equations	Ordinary Differential Equations	Differential Equations	Ordinary Differential Equations	Differential Equations	Ordinary Differential Equations	Differential Equations	Ordinary Differential Equations	100%
2023-10-16	Mathematics: Partial Differential Equations	Completed assignment on wave equations.	Done	Partial Differential Equations	Wave Equations	Partial Differential Equations	Wave Equations	Partial Differential Equations	Wave Equations	Partial Differential Equations	Wave Equations	Partial Differential Equations	Wave Equations	Partial Differential Equations	Wave Equations	100%
2023-10-17	Mathematics: Numerical Analysis	Completed assignment on numerical methods for ODEs.	Done	Numerical Analysis	Numerical Methods for ODEs	Numerical Analysis	Numerical Methods for ODEs	Numerical Analysis	Numerical Methods for ODEs	Numerical Analysis	Numerical Methods for ODEs	Numerical Analysis	Numerical Methods for ODEs	Numerical Analysis	Numerical Methods for ODEs	100%
2023-10-18	Mathematics: Optimization	Completed assignment on linear programming.	Done	Optimization	Linear Programming	Optimization	Linear Programming	Optimization	Linear Programming	Optimization	Linear Programming	Optimization	Linear Programming	Optimization	Linear Programming	100%
2023-10-19	Mathematics: Game Theory	Completed assignment on Nash equilibria.	Done	Game Theory	Nash Equilibria	Game Theory	Nash Equilibria	Game Theory	Nash Equilibria	Game Theory	Nash Equilibria	Game Theory	Nash Equilibria	Game Theory	Nash Equilibria	100%
2023-10-20	Mathematics: Probability Theory	Completed assignment on stochastic processes.	Done	Probability Theory	Stochastic Processes	Probability Theory	Stochastic Processes	Probability Theory	Stochastic Processes	Probability Theory	Stochastic Processes	Probability Theory	Stochastic Processes	Probability Theory	Stochastic Processes	100%
2023-10-21	Mathematics: Information Theory	Completed assignment on entropy and mutual information.	Done	Information Theory	Entropy and Mutual Information	Information Theory	Entropy and Mutual Information	Information Theory	Entropy and Mutual Information	Information Theory	Entropy and Mutual Information	Information Theory	Entropy and Mutual Information	Information Theory	Entropy and Mutual Information	100%

Date	Topic/Session Program/Subject/Unit Activity	Instructor/Teacher	Status	Time Start End	Session 1		Session 2		Session 3		Session 4		Session 5		Session 6		Session 7		Total Time Spent
					Topic	Activity	Topic	Activity	Topic	Activity	Topic	Activity	Topic	Activity	Topic	Activity	Topic	Activity	
2023-01-01	Introduction to the course Overview of the program Welcome to the course	Dr. John Doe	Completed	09:00	10:00	10:00	11:00	11:00	12:00	12:00	13:00	13:00	14:00	14:00	15:00	15:00	16:00	16:00	01:00
2023-01-02	Session 1: Fundamentals of the subject Key concepts and definitions	Dr. John Doe	Completed	09:00	10:00	10:00	11:00	11:00	12:00	12:00	13:00	13:00	14:00	14:00	15:00	15:00	16:00	16:00	01:00
2023-01-03	Session 2: Advanced topics In-depth exploration of the subject	Dr. John Doe	Completed	09:00	10:00	10:00	11:00	11:00	12:00	12:00	13:00	13:00	14:00	14:00	15:00	15:00	16:00	16:00	01:00
2023-01-04	Session 3: Practical applications Hands-on experience with the subject	Dr. John Doe	Completed	09:00	10:00	10:00	11:00	11:00	12:00	12:00	13:00	13:00	14:00	14:00	15:00	15:00	16:00	16:00	01:00
2023-01-05	Session 4: Case studies and analysis Real-world examples and their implications	Dr. John Doe	Completed	09:00	10:00	10:00	11:00	11:00	12:00	12:00	13:00	13:00	14:00	14:00	15:00	15:00	16:00	16:00	01:00
2023-01-06	Session 5: Group projects and presentations Collaborative learning and communication skills	Dr. John Doe	Completed	09:00	10:00	10:00	11:00	11:00	12:00	12:00	13:00	13:00	14:00	14:00	15:00	15:00	16:00	16:00	01:00
2023-01-07	Session 6: Review and consolidation Recap of key concepts and findings	Dr. John Doe	Completed	09:00	10:00	10:00	11:00	11:00	12:00	12:00	13:00	13:00	14:00	14:00	15:00	15:00	16:00	16:00	01:00
2023-01-08	Session 7: Final assessment and feedback Evaluation of learning outcomes and course effectiveness	Dr. John Doe	Completed	09:00	10:00	10:00	11:00	11:00	12:00	12:00	13:00	13:00	14:00	14:00	15:00	15:00	16:00	16:00	01:00
2023-01-09	Session 8: Guest lecture and Q&A Expert insights and answers to student questions	Dr. John Doe	Completed	09:00	10:00	10:00	11:00	11:00	12:00	12:00	13:00	13:00	14:00	14:00	15:00	15:00	16:00	16:00	01:00
2023-01-10	Session 9: Final project presentation Showcase of student work and achievements	Dr. John Doe	Completed	09:00	10:00	10:00	11:00	11:00	12:00	12:00	13:00	13:00	14:00	14:00	15:00	15:00	16:00	16:00	01:00
2023-01-11	Session 10: Course wrap-up and future prospects Reflection on the course and opportunities ahead	Dr. John Doe	Completed	09:00	10:00	10:00	11:00	11:00	12:00	12:00	13:00	13:00	14:00	14:00	15:00	15:00	16:00	16:00	01:00

[illegible]

Date	Transaction Description (and amount)	Reference	Month	First entry in this column	Second Column		Third Column		Fourth Column		Fifth Column		Sixth Column		Seventh Column		Total
					Jan	Apr	Jan	Apr	Jan	Apr	Jan	Apr	Jan	Apr	Jan	Apr	

BAB IV

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN

A. Pelaksanaan Program / Kegiatan 2 Tahun Terakhir (Target dan Realisasi Tahun 2022 dan 2023)

Sistem perencanaan dan penganggaran secara regulasi telah mengalami beberapa kali perubahan dalam penerapannya. Dari mulai menggunakan pendekatan tradisional hingga menjadi penganggaran berbasis kinerja (PBK). Perubahan ini ditandai dengan lahirnya beberapa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan, dan Pendapatan Daerah dalam penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja terus melakukan perbaikan salah satunya melalui penataan arsitektur dan informasi kinerja. Penataan yang dilakukan tersebut bertujuan memperkuat pondasi sistem penganggaran berbasis kinerja. Sudah seharusnya proses perencanaan anggaran dengan cara melakukan *banchmarking* terkait penerapan reformasi pengelolaan keuangan publik untuk mendapatkan *best practice* yang tepat terhadap peraturan perundang-undangan. Harmonisasi antara *stakeholder* diharapkan dapat menciptakan perencanaan dan penganggaran yang berkualitas. Sejalan dengan itu, evaluasi kinerja di Badan Pengelolaan Keuangan, dan Pendapatan Daerah dalam mencapai visi dan misi menjadi faktor utama yang bukan hanya dilihat dari sisi penyerapan anggaran. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

TABEL 4.1
HASIL CUKRAH PROGRAM RENCANA 2021 - 2026
WILAYAH PELAKSANAAN SATU TAHUN 2021 DAN 2022 DENGAN LUGUAN
SEKAWA POKOKJUALAN KULIAH DAN POKOKJUALAN DOKTER

No	Kategori Cukrah	Kategori Cukrah	Jumlah	2021				2022				2023				Total	Catatan
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	1. CUKRAH	1. CUKRAH	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2	2. CUKRAH	2. CUKRAH	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
3	3. CUKRAH	3. CUKRAH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
4	4. CUKRAH	4. CUKRAH	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
5	5. CUKRAH	5. CUKRAH	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
6	6. CUKRAH	6. CUKRAH	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
7	7. CUKRAH	7. CUKRAH	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
8	8. CUKRAH	8. CUKRAH	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
9	9. CUKRAH	9. CUKRAH	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
10	10. CUKRAH	10. CUKRAH	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
11	11. CUKRAH	11. CUKRAH	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
12	12. CUKRAH	12. CUKRAH	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
13	13. CUKRAH	13. CUKRAH	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	
14	14. CUKRAH	14. CUKRAH	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	
15	15. CUKRAH	15. CUKRAH	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
16	16. CUKRAH	16. CUKRAH	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	
17	17. CUKRAH	17. CUKRAH	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	
18	18. CUKRAH	18. CUKRAH	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	
19	19. CUKRAH	19. CUKRAH	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	
20	20. CUKRAH	20. CUKRAH	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	



No	Nama Kegiatan	Jumlah Kegiatan	Jumlah Peserta	Jumlah Kegiatan		Jumlah Peserta		Jumlah Kegiatan		Jumlah Peserta		Jumlah Kegiatan		Jumlah Peserta		Jumlah Kegiatan	Jumlah Peserta
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Program Kerja	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Program Kerja	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Program Kerja	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Program Kerja	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	Program Kerja	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Program Kerja	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Program Kerja	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	Program Kerja	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	Program Kerja	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Program Kerja	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	Program Kerja	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	Program Kerja	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	Program Kerja	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	Program Kerja	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	Program Kerja	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16	Program Kerja	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17	Program Kerja	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18	Program Kerja	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19	Program Kerja	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20	Program Kerja	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



No	Nama Kegiatan	Informasi	Waktu	Kategori				Sub Kategori				Status	Catatan		
				Kategori	Sub Kategori	Kategori	Sub Kategori	Kategori	Sub Kategori						
1	Kegiatan 1	Informasi 1	10/10/2023	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1
2	Kegiatan 2	Informasi 2	11/10/2023	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1
3	Kegiatan 3	Informasi 3	12/10/2023	3	3.1	3.1.1	3.1.1.1	3.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1
4	Kegiatan 4	Informasi 4	13/10/2023	4	4.1	4.1.1	4.1.1.1	4.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1
5	Kegiatan 5	Informasi 5	14/10/2023	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.1.1	5.1.1.1.1.1	5.1.1.1.1.1.1	5.1.1.1.1.1.1.1	5.1.1.1.1.1.1.1.1	5.1.1.1.1.1.1.1.1.1	5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1
6	Kegiatan 6	Informasi 6	15/10/2023	6	6.1	6.1.1	6.1.1.1	6.1.1.1.1	6.1.1.1.1.1	6.1.1.1.1.1.1	6.1.1.1.1.1.1.1	6.1.1.1.1.1.1.1.1	6.1.1.1.1.1.1.1.1.1	6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1
7	Kegiatan 7	Informasi 7	16/10/2023	7	7.1	7.1.1	7.1.1.1	7.1.1.1.1	7.1.1.1.1.1	7.1.1.1.1.1.1	7.1.1.1.1.1.1.1	7.1.1.1.1.1.1.1.1	7.1.1.1.1.1.1.1.1.1	7.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	7.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1
8	Kegiatan 8	Informasi 8	17/10/2023	8	8.1	8.1.1	8.1.1.1	8.1.1.1.1	8.1.1.1.1.1	8.1.1.1.1.1.1	8.1.1.1.1.1.1.1	8.1.1.1.1.1.1.1.1	8.1.1.1.1.1.1.1.1.1	8.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	8.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1
9	Kegiatan 9	Informasi 9	18/10/2023	9	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.1.1.1.1	9.1.1.1.1.1	9.1.1.1.1.1.1	9.1.1.1.1.1.1.1	9.1.1.1.1.1.1.1.1	9.1.1.1.1.1.1.1.1.1	9.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	9.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1
10	Kegiatan 10	Informasi 10	19/10/2023	10	10.1	10.1.1	10.1.1.1	10.1.1.1.1	10.1.1.1.1.1	10.1.1.1.1.1.1	10.1.1.1.1.1.1.1	10.1.1.1.1.1.1.1.1	10.1.1.1.1.1.1.1.1.1	10.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	10.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1

No	Nama Kegiatan	Jenis Kegiatan	Waktu	Kategori		Sub Kategori		Detail Kegiatan		Detail Kegiatan		Status	Catatan
				1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Kegiatan 1	Kegiatan 1	10/10/2020	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Kegiatan 2	Kegiatan 2	10/10/2020	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Kegiatan 3	Kegiatan 3	10/10/2020	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Kegiatan 4	Kegiatan 4	10/10/2020	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Kegiatan 5	Kegiatan 5	10/10/2020	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Kegiatan 6	Kegiatan 6	10/10/2020	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Kegiatan 7	Kegiatan 7	10/10/2020	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Kegiatan 8	Kegiatan 8	10/10/2020	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Kegiatan 9	Kegiatan 9	10/10/2020	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Kegiatan 10	Kegiatan 10	10/10/2020	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Kegiatan 11	Kegiatan 11	10/10/2020	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Kegiatan 12	Kegiatan 12	10/10/2020	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	Kegiatan 13	Kegiatan 13	10/10/2020	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Kegiatan 14	Kegiatan 14	10/10/2020	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	Kegiatan 15	Kegiatan 15	10/10/2020	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



No	Nama Kegiatan	Jumlah Kegiatan	Jumlah Peserta	Jumlah Kegiatan		Jumlah Peserta		Jumlah Kegiatan		Jumlah Peserta		Jumlah Kegiatan	Jumlah Peserta
				2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020		
1	Kegiatan Pengabdian Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kegiatan Pengabdian Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Kegiatan Pengabdian Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Kegiatan Pengabdian Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Kegiatan Pengabdian Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Kegiatan Pengabdian Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Kegiatan Pengabdian Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Kegiatan Pengabdian Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Kegiatan Pengabdian Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Kegiatan Pengabdian Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Kegiatan Pengabdian Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Kegiatan Pengabdian Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



No	Nama Kegiatan	Jumlah Kegiatan	Jumlah Peserta	Jumlah Kegiatan			Jumlah Peserta			Jumlah Kegiatan			Jumlah Peserta			Jumlah Kegiatan	Jumlah Peserta
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Kegiatan 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Kegiatan 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Kegiatan 3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Kegiatan 4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	Kegiatan 5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Kegiatan 6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Kegiatan 7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	Kegiatan 8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	Kegiatan 9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Kegiatan 10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	Kegiatan 11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	Kegiatan 12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	Kegiatan 13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	Kegiatan 14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	Kegiatan 15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16	Kegiatan 16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17	Kegiatan 17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18	Kegiatan 18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19	Kegiatan 19	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20	Kegiatan 20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

No	Nama Kegiatan	Jumlah Kegiatan	Jumlah Peserta	Jumlah Kegiatan		Jumlah Peserta		Jumlah Kegiatan		Jumlah Peserta		Jumlah Kegiatan		Jumlah Peserta		Jumlah Kegiatan	Jumlah Peserta
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	1. Kegiatan Kelembagaan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2. Kegiatan Kelembagaan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	3. Kegiatan Kelembagaan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	4. Kegiatan Kelembagaan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	5. Kegiatan Kelembagaan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	6. Kegiatan Kelembagaan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	7. Kegiatan Kelembagaan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	8. Kegiatan Kelembagaan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	9. Kegiatan Kelembagaan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	10. Kegiatan Kelembagaan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

No	Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Kegiatan			Kegiatan			Kegiatan			Kegiatan			Catatan	Keterangan
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	1. Kegiatan Persiapan	1. Kegiatan Persiapan	1. Kegiatan Persiapan														
2	2. Kegiatan Pelaksanaan	2. Kegiatan Pelaksanaan	2. Kegiatan Pelaksanaan														
3	3. Kegiatan Penutupian	3. Kegiatan Penutupian	3. Kegiatan Penutupian														
4	4. Kegiatan Evaluasi	4. Kegiatan Evaluasi	4. Kegiatan Evaluasi														
5	5. Kegiatan Laporan	5. Kegiatan Laporan	5. Kegiatan Laporan														
6	6. Kegiatan Penyelesaian	6. Kegiatan Penyelesaian	6. Kegiatan Penyelesaian														
7	7. Kegiatan Penyelesaian	7. Kegiatan Penyelesaian	7. Kegiatan Penyelesaian														

No	Nama Kegiatan	Jumlah Kegiatan	Unit Kegiatan	Kategori		Sub Kategori		Detail Kegiatan		Detail Kegiatan		Status	Catatan
				1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Kegiatan 1	1	Unit 1	1	1	1	1	1	1	1	1		
2	Kegiatan 2	1	Unit 1	1	1	1	1	1	1	1	1		
3	Kegiatan 3	1	Unit 1	1	1	1	1	1	1	1	1		
4	Kegiatan 4	1	Unit 1	1	1	1	1	1	1	1	1		
5	Kegiatan 5	1	Unit 1	1	1	1	1	1	1	1	1		
6	Kegiatan 6	1	Unit 1	1	1	1	1	1	1	1	1		
7	Kegiatan 7	1	Unit 1	1	1	1	1	1	1	1	1		
8	Kegiatan 8	1	Unit 1	1	1	1	1	1	1	1	1		
9	Kegiatan 9	1	Unit 1	1	1	1	1	1	1	1	1		
10	Kegiatan 10	1	Unit 1	1	1	1	1	1	1	1	1		
11	Kegiatan 11	1	Unit 1	1	1	1	1	1	1	1	1		
12	Kegiatan 12	1	Unit 1	1	1	1	1	1	1	1	1		
13	Kegiatan 13	1	Unit 1	1	1	1	1	1	1	1	1		
14	Kegiatan 14	1	Unit 1	1	1	1	1	1	1	1	1		
15	Kegiatan 15	1	Unit 1	1	1	1	1	1	1	1	1		
16	Kegiatan 16	1	Unit 1	1	1	1	1	1	1	1	1		
17	Kegiatan 17	1	Unit 1	1	1	1	1	1	1	1	1		
18	Kegiatan 18	1	Unit 1	1	1	1	1	1	1	1	1		
19	Kegiatan 19	1	Unit 1	1	1	1	1	1	1	1	1		
20	Kegiatan 20	1	Unit 1	1	1	1	1	1	1	1	1		



No	Nama Kegiatan	Jumlah Kegiatan	Jumlah Peserta	Jumlah Kegiatan		Jumlah Peserta		Jumlah Kegiatan		Jumlah Peserta		Jumlah Kegiatan	Jumlah Peserta
				1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Kegiatan 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Kegiatan 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Kegiatan 3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Kegiatan 4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	Kegiatan 5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Kegiatan 6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Kegiatan 7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	Kegiatan 8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	Kegiatan 9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Kegiatan 10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	Kegiatan 11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	Kegiatan 12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	Kegiatan 13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	Kegiatan 14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	Kegiatan 15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16	Kegiatan 16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17	Kegiatan 17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18	Kegiatan 18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19	Kegiatan 19	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20	Kegiatan 20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Besaran anggaran dan maksimalnya penyerapan anggaran tidak menjamin kinerja dari suatu organisasi dapat dicapai dengan baik. Untuk itu perlu pemahaman yang baik tentang anggaran itu sendiri. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial dan menyatakan berapa biaya atas rencana-rencana yang dibuat (pengeluaran/belanja) serta berapa banyak dan bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah kebijakan keuangan tahunan pemerintah daerah yang disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan berbagai pertimbangan agar penyusunan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi mudah dilakukan. Penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Realisasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp128.985.276,65 atau sebesar 97,31% dari alokasi yang dianggarkan yaitu sebesar Rp132.550.479.452,93. Untuk lebih jelas realisasi program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.2
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022

Indikator	Uraian	Hasil Berkas Dokumen	Revisi	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
01.	URAIAN REKAPITULASI MODAL PENGUATAN URAIAN REKAPITULASI DAERAH OMBUDSMAN			10.000.176.187,00	10.108.880,00	94,07%
01.2.01.	Revisi, Pengantar, dan Kajian			98.271.580,00	97.017.210,00	97,71%
01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Revisi	Hasil	Revisi	97.017.210,00	96.888.000,00	99,87%
		Dokumen	Revisi	10,00%	10,00%	100,00%
01.2.01.05.	Revisi dan Penyusunan Laporan Daerah	Hasil	Revisi	97.000.000,00	96.888.010,00	99,89%
		Dokumen	Revisi	10,00%	10,00%	100,00%
01.2.02.	Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah			10.000.000.000,00	9.888.880.110,00	97,30%
01.2.02.01.	Penyusunan dan Pengantar	Hasil	Revisi	10.000.000.000,00	9.888.880.110,00	97,30%
		Dokumen	Revisi	10,00%	10,00%	100,00%
01.2.02.	Administrasi Umum Pemerintah Daerah			2.000.000.000,00	1.888.880.110,00	94,47%

REKONSTRUKSI	LOKASI	INSTRUMEN	STATUS	REKONSTRUKSI	REKONSTRUKSI	%
17.1.10.01	Perbaikan Perbaikan dan Perbaikan Jalan	Aspal	Rusak	1.100.000.000,00	821.111.111,11	82,47%
		Aspal	Baik	1,00	1,00	100,00%
		Aspal	Rusak	100,00%	100,00%	100,00%
17.1.10.02	Perbaikan Perbaikan Koral/Tempat	Aspal	Rusak	28.000.000,00	21.800.000,00	88,57%
		Aspal	Baik	1,00	1,00	100,00%
		Aspal	Rusak	100,00%	100,00%	100,00%
17.1.10.03	Perbaikan Saluran air di Jalan	Aspal	Rusak	10.000.000,00	8.150.000,00	81,50%
		Aspal	Baik	1,00	1,00	100,00%
		Aspal	Rusak	100,00%	100,00%	100,00%
17.1.10.04	Perbaikan Saluran air di Jalan dan Perbaikan Perbaikan Jalan	Aspal	Rusak	100.000.000,00	79.600.000,00	79,60%
		Aspal	Baik	1,00	1,00	100,00%
		Aspal	Rusak	100,00%	100,00%	100,00%
17.1.10.05	Perbaikan Saluran air di Jalan dan Perbaikan Perbaikan Jalan	Aspal	Rusak	50.000.000,00	39.600.000,00	79,20%
		Aspal	Baik	1,00	1,00	100,00%
		Aspal	Rusak	100,00%	100,00%	100,00%
17.1.10.06	Perbaikan Saluran air di Jalan	Aspal	Rusak	100.000.000,00	79.600.000,00	79,60%
		Aspal	Baik	1,00	1,00	100,00%
		Aspal	Rusak	100,00%	100,00%	100,00%
17.1.10.07	Perbaikan Saluran air di Jalan dan Perbaikan Perbaikan Jalan	Aspal	Rusak	200.000.000,00	157.272.727,27	78,64%
		Aspal	Baik	1,00	1,00	100,00%
		Aspal	Rusak	100,00%	100,00%	100,00%
17.1.10.08	Perbaikan Saluran air di Jalan dan Perbaikan Perbaikan Jalan	Aspal	Rusak	300.000.000,00	239.600.000,00	79,87%
		Aspal	Baik	1,00	1,00	100,00%
		Aspal	Rusak	100,00%	100,00%	100,00%
17.1.10.09	Perbaikan Saluran air di Jalan dan Perbaikan Perbaikan Jalan	Aspal	Rusak	2.000.000.000,00	1.596.000.000,00	79,80%
		Aspal	Baik	1,00	1,00	100,00%
		Aspal	Rusak	100,00%	100,00%	100,00%
17.1.10.10	Perbaikan Saluran air di Jalan dan Perbaikan Perbaikan Jalan	Aspal	Rusak	2.000.000.000,00	1.596.000.000,00	79,80%
		Aspal	Baik	1,00	1,00	100,00%
		Aspal	Rusak	100,00%	100,00%	100,00%
17.1.10.11	Perbaikan Saluran air di Jalan dan Perbaikan Perbaikan Jalan	Aspal	Rusak	2.000.000.000,00	1.596.000.000,00	79,80%
		Aspal	Baik	1,00	1,00	100,00%
		Aspal	Rusak	100,00%	100,00%	100,00%
17.1.10.12	Perbaikan Saluran air di Jalan dan Perbaikan Perbaikan Jalan	Aspal	Rusak	2.000.000.000,00	1.596.000.000,00	79,80%
		Aspal	Baik	1,00	1,00	100,00%
		Aspal	Rusak	100,00%	100,00%	100,00%
17.1.10.13	Perbaikan Saluran air di Jalan dan Perbaikan Perbaikan Jalan	Aspal	Rusak	2.000.000.000,00	1.596.000.000,00	79,80%
		Aspal	Baik	1,00	1,00	100,00%
		Aspal	Rusak	100,00%	100,00%	100,00%
17.1.10.14	Perbaikan Saluran air di Jalan dan Perbaikan Perbaikan Jalan	Aspal	Rusak	2.000.000.000,00	1.596.000.000,00	79,80%
		Aspal	Baik	1,00	1,00	100,00%
		Aspal	Rusak	100,00%	100,00%	100,00%
17.1.10.15	Perbaikan Saluran air di Jalan dan Perbaikan Perbaikan Jalan	Aspal	Rusak	2.000.000.000,00	1.596.000.000,00	79,80%
		Aspal	Baik	1,00	1,00	100,00%
		Aspal	Rusak	100,00%	100,00%	100,00%
17.1.10.16	Perbaikan Saluran air di Jalan dan Perbaikan Perbaikan Jalan	Aspal	Rusak	2.000.000.000,00	1.596.000.000,00	79,80%
		Aspal	Baik	1,00	1,00	100,00%
		Aspal	Rusak	100,00%	100,00%	100,00%
17.1.10.17	Perbaikan Saluran air di Jalan dan Perbaikan Perbaikan Jalan	Aspal	Rusak	2.000.000.000,00	1.596.000.000,00	79,80%
		Aspal	Baik	1,00	1,00	100,00%
		Aspal	Rusak	100,00%	100,00%	100,00%
17.1.10.18	Perbaikan Saluran air di Jalan dan Perbaikan Perbaikan Jalan	Aspal	Rusak	2.000.000.000,00	1.596.000.000,00	79,80%
		Aspal	Baik	1,00	1,00	100,00%
		Aspal	Rusak	100,00%	100,00%	100,00%

KODE	Uraian	Unit Desa/ Kelurahan	Salah	Anggaran	Realisasi	%
		Desa	Sum	100	100	100.00%
		Desa	Revisi	100.00%	100.00%	100.00%
01	ANGGARAN BELAKANG PENGADAAN BARANG			959.883.000.00	716.719.789.00	81.86%
01.01	Anggaran Pengadaan barang dan jasa			959.883.000.00	716.719.789.00	81.86%
01.01.01	Proses dan Pengiriman barang dan jasa	Desa	Kumulatif	25.028.000.00	20.103.077.00	80.32%
		Desa	Sum	100	100	100.00%
		Desa	Revisi	100.00%	100.00%	100.00%
01.01.02	Penyediaan dan Pengiriman barang dan jasa	Desa	Kumulatif	22.280.000.00	17.280.000.00	77.60%
		Desa	Sum	100	100	100.00%
		Desa	Revisi	100.00%	100.00%	100.00%
01.01.03	Perbaikan dan Perbaikan barang dan jasa	Desa	Kumulatif	15.875.000.00	15.880.000.00	100.00%
		Desa	Sum	100	100	100.00%
		Desa	Revisi	100.00%	100.00%	100.00%
01.01.04	Pengadaan barang dan jasa	Desa	Kumulatif	27.903.000.00	22.863.000.00	81.94%
		Desa	Sum	100	100	100.00%
		Desa	Revisi	100.00%	100.00%	100.00%
01.01.05	Pengadaan barang dan jasa	Desa	Kumulatif	288.100.000.00	218.200.000.00	75.74%
		Desa	Sum	100	100	100.00%
		Desa	Revisi	100.00%	100.00%	100.00%
TOTAL				112.000.000.00	108.880.000.00	97.21%

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran 2023

Selanjutnya realisasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp'42.876.473.50700 atau sebesar 98,24% dari alokasi yang dianggarkan yaitu sebesar Rp'145.433.396.317.00. Untuk lebih jelas realisasi program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.3
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023

KODE	Uraian	Unit Desa/ Kelurahan	Salah	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
01.01	ANGGARAN BELAKANG PENGADAAN BARANG			10.000.000.00	9.800.000.00	98.00%
01.01.01	Proses dan Pengiriman barang dan jasa	Desa	Kumulatif	10.000.000.00	9.800.000.00	98.00%
01.01.01.01	Proses dan Pengiriman barang dan jasa	Desa	Kumulatif	10.000.000.00	9.800.000.00	98.00%
		Desa	Sum	100	100	100.00%
		Desa	Revisi	100.00%	100.00%	100.00%
01.01.02	Penyediaan dan Pengiriman barang dan jasa	Desa	Kumulatif	800.000.00	790.000.00	98.75%
		Desa	Sum	100	100	100.00%
		Desa	Revisi	100.00%	100.00%	100.00%
01.01.03	Perbaikan dan Perbaikan barang dan jasa	Desa	Kumulatif	10.000.000.00	9.800.000.00	98.00%
		Desa	Sum	100	100	100.00%
		Desa	Revisi	100.00%	100.00%	100.00%
01.01.04	Pengadaan barang dan jasa	Desa	Kumulatif	10.000.000.00	9.800.000.00	98.00%
01.01.04.01	Pengadaan barang dan jasa	Desa	Kumulatif	10.000.000.00	9.800.000.00	98.00%
		Desa	Sum	100	100	100.00%
		Desa	Revisi	100.00%	100.00%	100.00%
01.01.05	Pengadaan barang dan jasa	Desa	Kumulatif	10.000.000.00	9.800.000.00	98.00%
01.01.05.01	Pengadaan barang dan jasa	Desa	Kumulatif	10.000.000.00	9.800.000.00	98.00%
		Desa	Sum	100	100	100.00%
		Desa	Revisi	100.00%	100.00%	100.00%
01.01.06	Pengadaan barang dan jasa	Desa	Kumulatif	10.000.000.00	9.800.000.00	98.00%
01.01.06.01	Pengadaan barang dan jasa	Desa	Kumulatif	10.000.000.00	9.800.000.00	98.00%

[illegible]

Sumber : Laporan Realitas Andoveran 2021

8. Hasil Capaian Program RPJMD 2021 – 2026 melalui Pelaksanaan RKPD Tahun 2022-2023

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan, dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna 2021 - 2026 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang harus dicapai selama lima (5) tahun sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Natuna. Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2021 - 2026 menjadi dasar pembuatan Rencana Kerja (Ranja) Program dan Kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Jangka Peringkat Daerah (RKPD) Kabupaten Natuna. Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan, dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 - 2026 merupakan dokumen perencanaan strategis jangka menengah (lima tahunan) yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan indikator kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan, dan Pendapatan Daerah.

Untuk menunjang kelancaran dan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut, diperlukan strategi yang tepat dan selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif sehingga Perangkat Daerah dapat mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien.

Capaian Program RPJMD 2021 - 2026 didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk persentase, indeks, rata-rata, angka dan jumlah. Persentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik. Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kinerja

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021
- 2026 dengan realisasinya.

Berikut disajikan Tabel Hasil Capaian Program RPJMD 2021 - 2026
melalui pelaksanaan RKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Tahun 2022 dan 2023 sebagai berikut:

TABEL 2.4
HAJAT CAPAIAN PROGRAM RPJMD 2021-2026
TOKONGONG DE' SAHUKU' SUKSES NER'ONG
MELALUI PELAKSANAAN SATU TAHUN 2021 DAN 2022 SELURUH KAWILAN
SARAN PEGESOLARAN SELURUH SAKSI TONGKONGTAN SAKSI

No	Kategori	Sub Kategori	Indikator	Tahun 2021										Total	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kategori 1	Sub Kategori 1	Indikator 1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			Indikator 2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			Indikator 3	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			Indikator 4	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Kategori 2	Sub Kategori 2	Indikator 1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			Indikator 2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			Indikator 3	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			Indikator 4	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Kategori 3	Sub Kategori 3	Indikator 1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			Indikator 2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			Indikator 3	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			Indikator 4	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Kategori 4	Sub Kategori 4	Indikator 1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			Indikator 2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			Indikator 3	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			Indikator 4	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Kategori 5	Sub Kategori 5	Indikator 1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			Indikator 2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			Indikator 3	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			Indikator 4	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Kategori 6	Sub Kategori 6	Indikator 1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			Indikator 2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			Indikator 3	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			Indikator 4	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Kategori 7	Sub Kategori 7	Indikator 1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			Indikator 2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			Indikator 3	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			Indikator 4	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8	Kategori 8	Sub Kategori 8	Indikator 1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			Indikator 2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			Indikator 3	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			Indikator 4	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9	Kategori 9	Sub Kategori 9	Indikator 1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			Indikator 2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			Indikator 3	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			Indikator 4	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10	Kategori 10	Sub Kategori 10	Indikator 1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			Indikator 2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			Indikator 3	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			Indikator 4	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

SURABAYA, 2021



C. Hasil Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tahun 2022 dan 2023

Hasil Capaian Indikator Kinerja Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan, dan Pendapatan Daerah Pendukung Visi dan Misi Kepala Daerah Tahun 2021 - 2026 tertuang dalam RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2021 - 2026 yang tertuang di dalam Rencana Strategis (Ranstra) Badan Pengelolaan Keuangan, dan Pendapatan Daerah. Pengukuran kinerja dari semua program dan kegiatan dilaksanakan dengan mengacu pada penilaian terhadap pengukuran kinerja untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana telah dilaksanakan berdasarkan indikator sasaran Badan Pengelolaan Keuangan, dan Pendapatan Daerah untuk Tahun 2021 - 2026.

Capaian kinerja untuk indikator kinerja Opini WTP BPK terhadap LKPD pada Tahun 2022 - 2023 dapat terealisasi 100 % artinya opini WTP berhasil dicapai berdasarkan hasil pemeriksaan BPK. Sasaran meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan indikator sasaran yaitu Opini BPK RI Terhadap Laporan Keuangan menjadi sasaran utama dari beberapa target di Badan Pengelola Keuangan Daerah dalam mencapai visi dan misi pencapaian WTP opini BPK mencerminkan kinerja pengelola keuangan dilakukan dengan maksimal.

Hal ini mencerminkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna telah melakukan penyusunan laporan keuangan telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, penyajian yang diungkapkan dalam laporan keuangan dituangkan sesuai dengan ketentuan dan penilaian tersebut menjadi indikator kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan sistem pengendalian intern telah dilakukan secara efektif. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya tidak mengalami perubahan namun Badan Pengelolaan Keuangan, dan Pendapatan Daerah terus melakukan perubahan dari sisi kualitas laporan keuangan.

Berikut disajikan Tabel Hasil Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pendukung Visi dan Misi Kepala Daerah Tahun 2021 - 2026 sebagai berikut:

Tabel 4.2
Gaya dan Momen Shear/Desain/NCI Perakutan/NCI/NCI
Tahun 2020 - 2021

[illegible]

[illegible]

D. Pelaksanaan Kerjasama dengan Pihak Ketiga Antara Pemerintah Baik Pusat, Provinsi, Kabupaten dengan Kabupaten Lainnya

Badan Pengelolaan Keuangan, dan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam bentuk perjanjian kerjasama, sebagai berikut:

- a. Perikatan Perjanjian Kerjasama (MoU) dengan PT. Bank Riau Kepri Cabang Ranai Tentang: "Pemanfaatan Fasilitas Perbankan dalam Rangka Pengelolaan Dana Kas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna" Nomor: 006/Mou/2018 dan Nomor :007/RNI/2018, ditandatangani di Ranai pada tanggal 09 Agustus 2018.
- b. Perikatan Perjanjian Kerjasama (MoU) dengan PT. Bank Riau Kepri Cabang Ranai Tentang Layanan Jasa Perbankan dilindungi Pemerintah Kabupaten Natuna Nomor 415.4/KS-KB/36/2021 di Ranai tanggal 15 September 2021.
- c. Perikatan Perjanjian Kerjasama (MoU) dengan PT. Bank Riau Kepri Cabang Ranai Tentang Pengelolaan Keuangan Rkening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Natuna Nomor 05/BPKPD-Mou/VI/2022 dan 003/BKX-RNI/2022 di Ranai tanggal 15 Juni 2022.

E. Keberhasilan/Penghargaan Yang diperoleh dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat

Beberapa penghargaan yang diterima Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah atas capaian kinerja tahun 2023 diantaranya:

- Peringkat I OPD tercepat dalam penyelesaian LHKPN dan LHKASN Tahun 2022 yang diberikan oleh Bupati Natuna pada tanggal 17 Februari 2023

Selain itu Kabupaten Natuna juga telah memperoleh penghargaan dari BPK RI Perwakilan Provinsi Kepri atas opri Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah daerah Tahun 2023. Penghargaan ini melingkupi penerimaan penghargaan opini yang sama yaitu WTP selama 7 kali dan 5 kalinya secara berturut-turut sampai pada tahun 2023.

F. Pelaksanaan Inovasi Perangkat Daerah

Reformasi birokrasi publik pada pemerintah daerah dilaksanakan tidak hanya mencakup pembanehan untuk menuju perampingan ukuran dan komponen birokrasi. Lebih dari itu, reformasi birokrasi publik juga mencakup perubahan secara *gradual* terhadap nilai (*public value*) dan budaya aparat pemerintah daerah yang berimplikasi pada etos kerja, kualitas pelayanan publik, hingga perubahan perilaku sebagai penguasa menjadi pelayanan dan pengayoman masyarakat.

Dalam rangka menjawab tantangan akan kebutuhan pelayanan yang cepat, efisien dan akuntabel tidak terlepas dari usaha agar dapat diwujudkan dalam suatu system pelayanan yang terpadu dan komprehensif. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah pada tahun 2023 telah Menyusun beberapa inovasi diantaranya:

1. Penggunaan Quick Response (QR) Code pada Barang Milik Daerah (BMD) dilakukan sebagai pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, peratussahan, pemeliharaan, dan pengemaran Barang Milik Daerah (BMD) yang di bawah penguasaannya.
2. E-Readah atau Elektrifikasi Pajak Daerah yaitu sebuah aplikasi mobile berfungsi untuk pelayanan pajak Daerah secara elektronik yang terdiri dari 19 fitur yang memudahkan pelayanan perpajakan kepada wajib pajak.
3. inovasi percepatan penyelesaian tindak lanjut tuntutan ganti kerugian dengan mengintegrasikan dari berbagai system ke dalam suatu aplikasi SiTanjek, yaitu aplikasi Sistem Informasi Monitoring Tindak lanjut hasil hasil

pemeriksaan yang sudah terintegrasi ke dalam system aplikasi yaitu Infis TUKD dan Data TGR.

6. Rekomendasi dan tindak lanjut untuk Rencana Pembangunan Tahun 2024/2024 berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Pembangunan 2023

Berdasarkan dari hasil evaluasi diatas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah merekomendasikan program dan kegiatan, dan hal-hal lain yang dianggap perlu untuk ditindaklanjuti dan dilanjutkan pada rencana Kerja Tahunan Tahun 2024/2025 di tabel sebagai berikut :

1.	Realisasi Pengeluaran Berang 100% Daerah Tahun 2020 sebesar 78,4 menunjukkan perlunya peningkatan kualitas pengeluaran Berang 100% daerah sesuai dengan parameter yang berlaku.	1. Pengeluaran Berang 100% Daerah ada - Analisa dan Pengembangan Pajal Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajal Daerah - Penyusunan dan Penyelenggaraan Kebijakan Pajal Daerah - Pemantauan dan Penataharan Objek Pajak Daerah - Dukungan Fasilitasi Pajak Daerah - Pengawasan Pajak Daerah	LEMBUKOM-Regenerasi 2004-2020
----	--	--	--

BAB V

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN RUTINITAS PERANGKAT
DAERAH BERDASARKAN TUPOKSI

Gambaran Realisasi dan capaian kinerja yang dilaksanakan di Badan Pengelolaan Keuangan, dan Pendapatan Daerah dapat dilihat pada Tahun 2023, sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan program kegiatan yang dilaksanakan pada masing-masing bidang di Badan Pengelolaan Keuangan, dan Pendapatan Daerah merupakan refleksi dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah, sehubungan dengan hal tersebut secara ringkas akan dijelaskan sesuai dengan bidang yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan, dan Pendapatan Daerah.

1. Sekretariat

Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan, dan Pendapatan Daerah memiliki tugas yaitu menyusun, merencanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kebijakan urusan perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kahumasan dan keprotokolan serta mengkoordinasikan tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, dan Pendapatan Daerah yang dalam hal ini melaksanakan 1 (satu) program dan 6 (enam) kegiatan dan 17 (tujuh belas) Sub kegiatan. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dianggarkan sebesar Rp16.088.514.045,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp15.284.815.553,00 atau mencapai 95,00% merupakan akumulasi dari 6 (enam) kegiatan. Dengan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dianggarkan sebesar Rp137.900.000,00 dengan realisasi sebesar Rp128.852.103,00 atau sebesar 81,60% dari total 2 (dua) Sub kegiatan yang menjadi Tupoksi Sub Bidang Perencanaan dan Keuangan. Untuk Sub Bidang Umum dan Kepegawaian dianggarkan untuk 3 Kegiatan dengan 15 (lima belas) Sub kegiatan, dengan alokasi sebesar Rp15.930.814.045,00 dengan realisasi sebesar Rp13.135.763.450,00 atau realisasi sebesar 95,14%. Berikut disajikan realisasi program dan kegiatan sebagaimana tabel dibawah ini:

Item No.	Item Description	Unit	Quantity	Unit Price	Total Price	%
1	Construction of 1000 sqm	sqm	1000	1000.00	1000000.00	100%
2	Construction of 2000 sqm	sqm	2000	2000.00	4000000.00	200%
3	Construction of 3000 sqm	sqm	3000	3000.00	9000000.00	300%
4	Construction of 4000 sqm	sqm	4000	4000.00	16000000.00	400%
5	Construction of 5000 sqm	sqm	5000	5000.00	25000000.00	500%
6	Construction of 6000 sqm	sqm	6000	6000.00	36000000.00	600%
7	Construction of 7000 sqm	sqm	7000	7000.00	49000000.00	700%
8	Construction of 8000 sqm	sqm	8000	8000.00	64000000.00	800%
9	Construction of 9000 sqm	sqm	9000	9000.00	81000000.00	900%
10	Construction of 10000 sqm	sqm	10000	10000.00	100000000.00	1000%

Copyright © 2004 by John Wiley & Sons, Inc.

2. Bidang Perencanaan Anggaran

Bidang Perencanaan Anggaran mempunyai tugas pokok melaksanakan persiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis bidang anggaran dan belanja, pelaporan BLUD, JKN, Penyertaan Modal, Dana Bergulir, investasi jangka pendek, tunjangan profesi guru PNSD, Tambahan Penghasilan guru PNSD dan Plutang yang dalam hal ini melaksanakan 1 (satu) program, 2 (dua) kegiatan dan 4 (empat) Sub Kegiatan dengan rincian realisasi 1 (satu) program yaitu sebesar Rp17.650.607.799 atau sebesar 96,96 % dari total anggaran yaitu sebesar Rp18.076.367.570 dengan rincian Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Anggaran Daerah dengan realisasi sebesar Rp2.054.516.303,00 atau sebesar 85,64% dari total anggaran yaitu sebesar Rp2.410.757.170,00. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, realisasi sebesar Rp115.658.032.400 atau sebesar 99,99% dari total anggaran sebesar Rp115.665.610.400. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2
Laporan Realisasi Anggaran Bidang Anggaran Tahun 2023

Kode	Uraian	Rencana 2023	Revisi	Anggaran	Realisasi	%
00.00.00	Kelembagaan Perbendaharaan Daerah			338.075.007,075	337.850.007,186	99,93%
00.00.01	Kelembagaan dan Penyelenggaraan Perbendaharaan Daerah			2.000.000,00,00	2.000.000.000,00	100,00%
00.00.01.01	Koordinasi dan Penyelenggaraan Perbendaharaan Daerah Anggaran APBD dan Perbendaharaan Daerah yang Perbendaharaan APBD		Anggaran	177.750.000,00	167.200.000,00	93,53%
			Revisi	10,00	10,00	100,00%
			Revisi	100,00%	100,00%	100,00%
00.00.01.02	Kelembagaan dan Penyelenggaraan Perbendaharaan Daerah Anggaran APBD dan Perbendaharaan Daerah yang Perbendaharaan APBD		Anggaran	780.000.000,00	673.000.000,00	86,28%
			Revisi	10,00	10,00	100,00%
			Revisi	100,00%	100,00%	100,00%
00.00.01.03	Koordinasi dan Penyelenggaraan Perbendaharaan Daerah		Anggaran	25.320.000,00	23.850.000,00	94,23%
			Revisi	10,00	10,00	100,00%
			Revisi	100,00%	100,00%	100,00%
00.00.01	Kelembagaan dan Penyelenggaraan Perbendaharaan Daerah			100.000.000,00	90.000.000,00	90,00%
00.00.01.05	Kelembagaan dan Penyelenggaraan Perbendaharaan Daerah		Anggaran	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00%
			Revisi	10,00	10,00	100,00%
			Revisi	100,00%	100,00%	100,00%
	Jumlah			338.075.007,075	337.850.007,186	99,93%

Sumber : Data LRA TA. 2023

3. Bidang Perbendaharaan Daerah

Bidang Perbendaharaan Daerah memiliki ikhtisar jabatan memimpin, mengkoordinasikan, dan menyusun bahan kebijakan terkait perbendaharaan daerah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai tujuan organisasi yang dalam hal ini melaksanakan 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan dengan rincian realisasi 1 (satu) Program Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu sebesar sebesar Rp1.111.061.073,00 atau sebesar 90,73% dari total anggaran yaitu sebesar Rp1.224.566.245,00 yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Abgrenzung	Umsatz	Wegfall Kunden Beziehungen	Beitrag	Umsatz	Beitrag	%
1	2	3	4	5	6	7
01.01.2015	Umsatz der Produktlinie der Informations Software			1.100.000.000,00	1.000.000.000,00	90,91%
01.01.2015	Umsatz der den Fertigungs-Produkten aus dem Bereich			1.100.000.000,00	1.000.000.000,00	90,91%
01.01.2015	Umsatz der den Fertigungs-Produkten	Info	Produkt	1.100.000.000,00	975.000.000,00	88,64%
		Service	Beitrag	25,00	25,00	0,23%
		Gesamtes	Produkt	110.000	100.000	0,91%
01.01.2015	Umsatz der Software, Services, Schulungen, Kunden- Unterstützung der Fertigungs-Produkten Dienstleistungen der Dienstleistungen	Info	Produkt	875.000.000,00	800.000.000,00	91,43%
		Service	Beitrag	25,00	25,00	0,23%
		Gesamtes	Produkt	875.000	800.000	0,91%
01.01.2015	Umsatz der den Fertigungs-Produkten Produkt-Produkten der Fertigungs-Produkten Dienstleistungen der Dienstleistungen der Fertigungs-Produkten Dienstleistungen der Fertigungs- Produkten Dienstleistungen der Fertigungs-Produkten Dienstleistungen	Info	Produkt	1.100.000.000,00	1.000.000.000,00	90,91%
		Service	Beitrag	25,00	25,00	0,23%
		Gesamtes	Produkt	110.000	100.000	0,91%
01.01.2015	Umsatz der den Fertigungs-Produkten Produkt-Produkten der Fertigungs-Produkten Dienstleistungen der Dienstleistungen der Fertigungs-Produkten Dienstleistungen der Fertigungs- Produkten Dienstleistungen der Fertigungs-Produkten Dienstleistungen	Info	Produkt	1.100.000.000,00	1.000.000.000,00	90,91%
		Service	Beitrag	25,00	25,00	0,23%
		Gesamtes	Produkt	110.000	100.000	0,91%

Bidang Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Laporan Tahunan 2023

Tabel 5.4
Laporan Realisasi Anggaran
Bidang Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Tahun 2023

Indikator	Subsidi	Diperkirakan Gedung	Batas	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
52.02.01	Melakukan Pelaksanaan dan Pelaksanaan Lainnya			342.000.000,00	342.000.000,00	100,00%
52.02.01	Melakukan dan Pelaksanaan dan Pelaksanaan Lainnya			342.000.000,00	342.000.000,00	100,00%
52.02.01	Melakukan dan Pelaksanaan dan Pelaksanaan Lainnya	Non	Kapal	342.000.000,00	342.000.000,00	100,00%
		Daerah	Daerah	10,00	10,00	100,00%
		Daerah	Daerah	100,00%	100,00%	100,00%
52.02.02	Melakukan dan Pelaksanaan dan Pelaksanaan Lainnya	Non	Kapal	342.000.000,00	342.000.000,00	100,00%
		Daerah	Daerah	10,00	10,00	100,00%
		Daerah	Daerah	100,00%	100,00%	100,00%
52.02.03	Melakukan dan Pelaksanaan dan Pelaksanaan Lainnya	Non	Kapal	342.000.000,00	342.000.000,00	100,00%
		Daerah	Daerah	10,00	10,00	100,00%
		Daerah	Daerah	100,00%	100,00%	100,00%
52.02.04	Melakukan dan Pelaksanaan dan Pelaksanaan Lainnya	Non	Kapal	342.000.000,00	342.000.000,00	100,00%
		Daerah	Daerah	10,00	10,00	100,00%
		Daerah	Daerah	100,00%	100,00%	100,00%
52.02.05	Melakukan dan Pelaksanaan dan Pelaksanaan Lainnya	Non	Kapal	342.000.000,00	342.000.000,00	100,00%
		Daerah	Daerah	10,00	10,00	100,00%
		Daerah	Daerah	100,00%	100,00%	100,00%
52.02.06	Melakukan dan Pelaksanaan dan Pelaksanaan Lainnya	Non	Kapal	342.000.000,00	342.000.000,00	100,00%
		Daerah	Daerah	10,00	10,00	100,00%
		Daerah	Daerah	100,00%	100,00%	100,00%
52.02.07	Melakukan dan Pelaksanaan dan Pelaksanaan Lainnya	Non	Kapal	342.000.000,00	342.000.000,00	100,00%
		Daerah	Daerah	10,00	10,00	100,00%
		Daerah	Daerah	100,00%	100,00%	100,00%
52.02.08	Melakukan dan Pelaksanaan dan Pelaksanaan Lainnya	Non	Kapal	342.000.000,00	342.000.000,00	100,00%
		Daerah	Daerah	10,00	10,00	100,00%
		Daerah	Daerah	100,00%	100,00%	100,00%
52.02.09	Melakukan dan Pelaksanaan dan Pelaksanaan Lainnya	Non	Kapal	342.000.000,00	342.000.000,00	100,00%
		Daerah	Daerah	10,00	10,00	100,00%
		Daerah	Daerah	100,00%	100,00%	100,00%
TOTAL				342.000.000,00	342.000.000,00	100,00%

Sumber : Data LRA TA. 2023

5. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas pokok penyusunan kebijakan teknis dan pedoman pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang dalam hal ini melaksanakannya 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan. Total realisasi Program Pengelolaan Milik

6. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah memiliki mempunyai tugas pokok penyusunan rencana kerja di Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang dalam hal ini melaksanakan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan 1 (satu) Kegiatan dan 9 (sembilan) Sub Kegiatan dengan total realisasi sebesar Rp 810,409,141 atau sebesar 84,68% dari total alokasi sebesar Rp 929,704,000. Berikut disajikan laporan realisasi bidang esat sebagaimana ditampilkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.8
Laporan Realisasi Anggaran
Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2023

Urutan	Uraian	Kategori Pengeluaran Daerah	Revisi	Alokasi	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
00.00.00	ANGGARAN PENGALOKASIAN PENDAPATAN DAERAH			819.761.000,00	810.409.141,00	87,51%
00.00.00	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			819.761.000,00	810.409.141,00	87,51%
00.00.00.00	Penerimaan dan Penerimaan Utang Milik Daerah	1001	Kapal	110.754.100,00	981.698.110,00	88,63%
		Barang	Kas	10,00	10,00	100,00%
		Barang	Kas	100,00%	100,00%	100,00%
00.00.00.00	Penerimaan Utang Milik Daerah	1001	Kapal	907.210.000,00	900.000.010,00	98,09%
		Barang	Kas	10,00	10,00	100,00%
		Barang	Kas	100,00%	100,00%	100,00%
00.00.00.00	Penerimaan Utang Daerah	1001	Kapal	108.110.000,00	110.881.000,00	101,64%
		Barang	Kas	10,00	10,00	100,00%
		Barang	Kas	100,00%	100,00%	100,00%
TOTAL				819.761.000,00	810.409.141,00	87,51%

Sumber: Data LRA TA. 2023

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Badan Pengelolaan Keuangan, dan Pendapatan Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 1 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Staf Ahli, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Inspektorat dan Badan Kabupaten.

Badan Pengelolaan Keuangan, dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna merupakan pendukung atas keberhasilan visi, misi Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2021 - 2026. Terhadap misi yang diambil oleh Kepala daerah Kabupaten Natuna 2021 - 2026 Badan Pengelolaan Keuangan, dan Pendapatan Daerah menjadi pelaksana dan penunjang dari segi pengelolaan keuangan dimana Badan Pengelolaan Keuangan, dan Pendapatan Daerah akan memberikan pelayanan kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, SKPD dan masyarakat luas yang terkait dengan pelaksanaan misi tersebut, dari segi pengelolaan keuangan.

Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah menetapkan Program prioritas sebagai pendukung Visi dan Misi RPJMD 2021 - 2026 Kabupaten Natuna adalah *"Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan"* dengan Indikator Program (Outcome) *"Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku"*, untuk lebih jelas mengenai program prioritas sebagai pendukung visi dan misi RPJMD 2021 - 2026 Kabupaten Natuna. Badan Pengelolaan Keuangan, dan Pendapatan Daerah dalam menetapkan rencana kinerja serta untuk mewujudkan visi, dan misi yang telah ditetapkan meliputi 3 (tiga) sasaran strategis yang tercermin dari 4 (empat) indikator sasaran yang dilaksanakan dalam beberapa program dan kegiatan.

Sesara umum capaian Sasaran strategis sampai pada tahun ke 2 pelaksanaan RKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sangat baik yang di tandai dari capaian kinerja yang tertuang dalam laporan ini. Meskipun ada 1 indikator kinerja yang belum mencapai target kinerja yang diharapkan yaitu persentase PAD terhadap pendapatan masih cukup rendah yaitu 6,77 yang artinya capaian kinerja dari RPJMD untuk tahun 2023 hanya 54,1 Persen. Masih rendahnya capaian kinerja yang dikur dari penerimaan pendapatan daerah ini dipengaruhi oleh faktor belum optimalnya kinerja program dan kegiatan dan belum pulihnya kondisi perekonomian Kabupaten Natuna pasca pandemic corona virus disease 2019 (covid19). Kebijakan pemerintah daerah yang memberikan kebijakan relaksasi pajak sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2023 mempengaruhi jumlah penerimaan Pajak Daerah terutama pada pajak PBB-P2, disamping masih adanya sektor pajak yang dapat dilakukan pemungutan diantaranya Pajak Serang Burung Walet dan belum optimalnya penerimaan dari Pajak Parkir, pajak Hotel dan Pajak Restoran.

Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan, sebaiknya mulai dilakukan pada saat perencanaan dan penganggaran secara terukur dan dilakukan evaluasi berkala oleh pimpinan sehingga masing-masing bidang dapat lebih fokus melaksanakan program dan kegiatan agar sasaran sebagaimana tersebut dalam RKT tercapai. Beberapa strategi telah dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah untuk mendukung dan mencapai visi misi yang ditetapkan. Komitmen penuh dari pimpinan beserta dukungan pegawai/staf di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan untuk lima tahun kedepan.

8. Rekomendasi

Berdasarkan dari hasil evaluasi diatas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah merekomendasikan program kegiatan untuk Rencana Kerja 2023/2024 sebagai berikut:

1. Merekomendasi untuk melanjutkan program Program Pengelolaan Keuangan Daerah yang paling sedikitnya terdiri dari 6 kegiatan untuk mendukung capaian kinerja utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yaitu tercapainya opini WTP pada laporan keuangan LKPD, Rasio Pengelolaan BMD yang baik serta tingginya Rasio Efektifitas Pajak Daerah.
2. Merekomendasikan kegiatan yang terkait dengan peningkatan capaian kinerja pada Tahun 2024/2025, terhadap peningkatan kualitas pengelolaan keuangan berbasis penggunaan aplikasi SIPD sebagaimana amanat Permandagri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
3. Merekomendasi untuk melanjutkan program kegiatan yang terkait dengan peningkatan Sumber Daya Manusia untuk tata kelola Barang Milik Daerah;
4. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam peningkatan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 2024/2025.
5. Merekomendasi untuk menjalin kerjasama dengan pihak ketiga, guna mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah;
6. Merekomendasi untuk melanjutkan Program Kegiatan yang terkait dengan peningkatan capaian kinerja dan target capaian 2024/2025 terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).



Reni, Maret 2024
Kepala

SURYANTO, S.E., MA
NIP.197709122000121004